



Pemerintah Daerah Kabupaten Solok

Peraturan Bupati Solok

Nomor 1 Tahun 2022

Tentang

**Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2021 Tentang Standar Harga
Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah
Daerah**

Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022



Badan Keuangan Daerah

Jl. Raya Padang-Solok KM.20 Arosuka

<https://bkd.solokkab.go.id/>

(0755) 31339

bkd@solokkab.go.id



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaannya, maka terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 37), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 12 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



STANDAR HARGA SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2022

1. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PNS

Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya PNS dapat diberikan kepada PNS/CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Pembayaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bagi PNS tidak termasuk pembayaran tambahan penghasilan lainnya. Bagi CPNS besaran tunjangan yang diterima adalah 60% dari besaran tunjangan yang telah ditetapkan.

1.1. SATUAN BIAYA BELANJA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan pagu dana belanja yang dikelola.		
	1.1 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran diberikan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	400.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	500.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	700.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	900.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	1.100.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	1.300.000
	1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. PPTK yang diangkat dari Pejabat Eselon IV/a atau IV/b.		
	PPTK yang diangkat dari Pejabat Eselon IV/a atau IV/b maka Honorarium berdasarkan pagu dana belanja yang dikelola terdiri dari :		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	300.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	500.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	600.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	700.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	800.000
	b. PPTK yang diangkat dari Staf		
	PPTK yang diangkat dari staf, maka Honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	1). Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	400.000
	2). Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	500.000
	3). Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	600.000
	4). Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	700.000
	5). Nilai Pagu Dana > Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	800.000
	6). Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	900.000
	1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan besaran honorarium berdasarkan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	1.3.1 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100.000.000	OB	500.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	580.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	670.000
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp.500.000.000 s.d. Rp.1.000.000.000	OB	760.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1.000.000.000	OB	850.000
	1.3.2 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Khusus		
	a. PPK pada Dinas Kesehatan	OB	950.000
	b. PPK pada Dinas Pendidikan	OB	1.050.000
	c. PPK pada Badan Keuangan Daerah	OB	1.150.000
	1.4 Bendahara Pengeluaran		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	250.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	350.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	450.000

4 p

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	550.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	650.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	750.000
	1.5 Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	a. Nilai Pagu Dana s.d Rp.100.000.000	OB	180.000
	b. Nilai Pagu Dana > Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	245.000
	c. Nilai Pagu Dana > Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	310.000
	d. Nilai Pagu Dana > Rp.500.000.000 s.d Rp.1.000.000.000	OB	375.000
	e. Nilai Pagu Dana Rp.1.000.000.000 s.d Rp.5.000.000.000	OB	440.000
	f. Nilai Pagu Dana > Rp.5.000.000.000	OB	505.000
	1.6 Pembantu Bendahara Pengeluaran	OB	350.000
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran. Besaran Honorarium sesuai dengan nilai pagu dana belanja yang dikelola.		
	1.7 Bendahara Penerima BKD selaku PPKD	OB	800.000
	Honorarium Bendahara Penerima BKD selaku PPKD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerima BKD selaku PPKD.		
	1.8 Bendahara Penerima SKPD		
	Honorarium Bendahara Penerima SKPD dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah ditunjuk sebagai Bendahara Penerima SKPD dengan besaran honorarium sesuai dengan target PAD yang dikelola.		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp.100.000.000	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100.000.000 s.d Rp.250.000.000	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000	OB	500.000
	d. Nilai Pagu dana di atas Rp.500.000.000 s.d. Rp.1.000.000.000	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.1.000.000.000	OB	600.000
	1.9 Bendahara Pemegang Barang Berharga	OB	500.000
	Honorarium Bendahara Pemegang Barang Berharga dapat diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Bendahara Pemegang Barang Berharga.		

2. SATUAN BIAYA HONORARIUM PNS/NON PNS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.1 Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara lainnya/ yang disetarakan	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.2 Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.3 Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4 Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
	1.5 Honorarium Fasilitator	OJ	400.000
2.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	2.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.1.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	2.1.2 Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	2.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	2.2.1 Yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
	2.3 Honorarium Tim Penilai Kinerja (TPK)		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	750.000
	c. Anggota	OB	750.000
	d. Sekretariat	OB	750.000
	2.4 Honorarium Tim Panitia Seleksi		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Anggota	OB	750.000

4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
3.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/ SAKSI/AHLI DAN BERACARA		
	3.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	1.800.000
	3.2 Honorarium Beracara	OK	1.800.000
	3.3 Honorarium Saksi Fakta/Saksi Biasa	OK	400.000
4.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	4.1 SLTA	OB	1.500.000
	4.2 DI/DII/DIII/Sarjana Terpadu	OB	1.750.000
	4.3 Sarjana (S1)	OB	2.000.000
	4.4 Sarjana (S2)	OB	2.500.000
	4.5 Sarjana (S3)	OB	3.000.000
5.	HONORARIUM ROHANIawan DAN KEGIATAN KEAGAMAAN		
	5.1 Rohaniawan	OK	400.000
	5.2 Penyuluh Agama Islam	OB	500.000
	5.3 Penyuluh Agama Daerah Terpencil	OB	1.000.000
	5.4 Dai Terpencil	OB	1.000.000
	5.5 Honor Khatib Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha		
	a. Dalam Daerah Sumbar	Paket	5.000.000
	b. Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	Paket	12.000.000
	c. Luar Sumbar Luar Pulau Sumatera	Paket	25.000.000
	5.6 Honorarium Penceramah Tabligh Akbar PHBI/HUT-Kab Solok/HUTRI	OH	5.000.000
	a. Dalam Daerah Sumbar	OH	5.000.000
	b. Luar Sumbar dalam Pulau Sumatera	OH	20.000.000
	c. Luar Sumbar Kelas Nasional dan Internasional	OH	35.000.000
	5.7 Honor Tim Penguji Tahfizh	OH	1.500.000
	5.8 Honor Mubaligh Tim Ramadhan	OH	500.000
	5.9 Honor Wartawan Tim Ramadhan	OH	150.000
	5.10 Honor Tenaga Ahli (Honor Pelatih MTQ)		
	a. Pelatih MTQ Kabupaten	OH	500.000
	b. Pelatih MTQ Provinsi	OH	900.000
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	6.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Perhalaman	200.000
	6.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000

h p

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	6.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Perhalaman	100.000
	6.4 Honorarium Tim Pengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)		
	Honorarium Tim SIPD dan SIPKD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai pengelola SIPD dan SIPKD yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas :		
	a. Koordinator	OB	750.000
	b. Administrator	OB	700.000
	c. Operator Kabupaten pada BKD	OB	550.000
	d. Operator pada SKPD	OB	500.000
7.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI		
	7.1 Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
	7.2 Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
8.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA		
	8.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Perbutir Soal	100.000
	8.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota		
	a. Telaah Materi Soal	Perbutir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Perbutir Soal	20.000
9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	9.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	9.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	300.000
	9.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara	OJP	200.000
	9.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	9.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a Lama Diklat s.d 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	400.000
	3) Sekretaris	OK	300.000
	4) Anggota	OK	300.000
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	600.000
	3) Sekretaris	OK	450.000
	4) Anggota	OK	450.000
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900.000
	2) Ketua/ Wakil Ketua	OK	800.000
	3) Sekretaris	OK	600.000
	4) Anggota	OK	600.000
	9.6 Honorarium Pengajar Diklat		
	a. Honorarium Tenaga Ahli	OJ	300.000
	b. Honorarium Pengajar	OJ	300.000
	c. Honorarium Moderator pada Seminar Proposal dan Seminar Hasil pada Latsar CPNS	OH	350.000
	d. Honorarium Widyaswara	JP	200.000
	e. Honorarium Penceramah/Narasumber	OH	1.000.000
10.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	10.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	10.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000
11.	HONORARIUM PENGURUSAN PERKARA HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN	Kasus	8.000.000
12.	HONORARIUM JUMPA PERS, WAWANCARA KHUSUS DAN PUBLIKASI PEMBERITAAN		
	12.1 Honorarium Jumpa Pers	Orang/ Pertemuan	200.000
	12.2 Honorarium Wawancara Khusus	Kegiatan	250.000
	12.3 Honorarium Publikasi Pemberitaan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua TP PKK	Berita	25.000
	12.4 Honorarium Publikasi Berita Biasa	Berita	20.000
	12.5 Honorarium Publikasi, Foto Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati	Foto/Keg Resmi	10.000
	12.6 Honorarium Publikasi khusus/pariwara portal	Kali	1.500.000

g	p
---	---

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
13.	HONORARIUM KESENIAN		
	13.1 Honorarium Penampilan Kesenian di Luar Kabupaten	Grup/ Hari	3.500.000
	13.2 Honorarium Penampilan Kesenian dalam Kabupaten	Grup/ Hari	2.500.000
	13.3 Honorarium Penampilan Kesenian dalam Nagari	Grup/ Hari	1.000.000
	13.4 Honorarium Penampilan Kesenian	Grup/ Hari	2.000.000
	13.5 Honorarium Penampilan Musik Kolaborasi	Grup/ Hari	4.000.000
	13.6 Honorarium Penampilan Kesenian dalam Kabupaten	OH	100.000
	13.7 Honorarium Penampilan Pawai Budaya dan Makan Bajamba	OH	150.000
	13.8 Honorarium Penampilan Kuliner Tradisi (Festifal Kuliner)	OH	100.000
	13.9 Honorarium Penampilan Pemotretan Pakaian Adat Tradisi Nagari	OH	150.000
	13.10 Honorarium Penampilan Pakaian Adat Tradisi Nagari	OH	150.000
	13.11 Honorarium membuat kajian penggalan budaya (Budayawan)	OK	2.000.000
	13.12 Honorarium Pengambilan Video/ Dokumentasi	OK	2.000.000
14.	HONORARIUM OLAHRAGA		
	14.1 Honorarium Pelatih Paralayang yang bersertifikasi	OK	4.000.000
15.	HONORARIUM JURI		
	15.1 Honorarium Juri Lomba dalam Kegiatan Even-even		
	a. Dalam Kabupaten	OH	150.000
	b. Luar Kabupaten	OH	300.000
	15.2 Honorarium Juri Lomba-lomba yang setingkat dan sejenis	OH	500.000
16.	HONORARIUM TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)		
	16.1 Pendidikan S3	OJ	750.000
	16.2 Pendidikan S2	OJ	600.000
	16.3 Pendidikan S1	OJ	500.000

3. SATUAN BIAYA BELANJA JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) Tenaga Administrasi	OB	3.000.000
	Jasa Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Solok dan Pegawai Tidak Tetap Pusat		
2.	Belanja Jasa Tenaga Honoror		
	Jasa Tenaga Honoror diberikan kepada Pegawai Honoror yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerja.		
	2.1 Resiko Sedang		
	a. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	OB	1.500.000
	b. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	OB	1.500.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	OB	1.500.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	OB	1.500.000
	e. Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	OB	1.500.000
	f. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	OB	1.500.000
	g. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	OB	1.500.000
	h. Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	OB	1.500.000
	i. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		1.500.000
	j. Belanja Jasa Tenaga Administrasi		1.500.000
	k. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	OB	1.500.000
	l. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	OB	1.500.000
	m. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	OB	1.500.000
	n. Belanja Jasa Tenaga Keamanan	OB	1.500.000
	o. Belanja Jasa Tenaga Caraka	OB	1.500.000
	p. Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	OB	1.500.000
	2.2 Resiko Tinggi		
	a. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	OB	2.000.000
	b. Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	OB	2.000.000
	c. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	OB	2.000.000
	d. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Aplikasi	OB	2.000.000
	e. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer Keuangan	OB	2.000.000
	f. Belanja Jasa Tenaga Ahli	OB	2.000.000
	g. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	OB	2.000.000
	h. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	2.000.000
	i. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	OB	2.000.000
	2.3 Tenaga Kesehatan RSUD		
	a. S1 + Profesi	OB	1.500.000
	b. S1/D.IV	OB	1.400.000
	c. D III	OB	1.300.000
	d. SMA Sederajat	OB	1.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	e. SD/SMP	OB	950.000
	f. Dokter Umum	OB	4.300.000
	g. Dokter Spesialis Anastesi	Kegiatan/ Kunjungan	1.200.000
	h. Dokter Spesialis Jiwa	Kegiatan/ Kunjungan	1.000.000
	i. Dokter Spesialis Anak	Kegiatan/ Kunjungan	1.000.000
	j. Dokter Spesialis Neurologi	Kegiatan/ Kunjungan	1.000.000
	k. Dokter Spesialis KFR	Kegiatan/ Kunjungan	1.000.000
	2.4 Tenaga Ahli DPRD		
	a. Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRD		
	- Pendidikan S3	OB	4.000.000
	- Pendidikan S2	OB	3.000.000
	b. Tenaga Ahli Fraksi		
	- Pendidikan S3	OB	3.000.000
	- Pendidikan S2	OB	2.500.000
	- Pendidikan S1	OB	2.000.000
	2.5 Tenaga Honorer Staf Khusus, Ajudan dan Sespri		
	a. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	OB	3.000.000
	b. Sespri Bupati/Wakil Bupati	OB	2.850.000
	c. Ajudan Bupati/Ajudan Wakil Bupati	OB	2.750.000
	d. Ajudan Ketua DPRD	OB	2.750.000
	e. Ajudan Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.500.000
	f. Ajudan Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
	g. Sespri Sekretaris Daerah	OB	2.250.000
	h. Ajudan Asisten	OB	2.000.000
	2.6 Tenaga Honorer Sopir		
	a. Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OB	2.500.000
	b. Wakil Ketua DPRD dan Sekda	OB	2.250.000
	c. Istri Bupati/Istri Wakil Bupati	OB	2.250.000
	d. Eselon II b	OB	2.000.000
	e. Eselon III	OB	1.750.000
	f. Kendaraan Operasional (Bus, Truk, Damkar, Ambulance dll)	OB	1.600.000
3.	Belanja Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan		
	3.1 Jasa Tenaga Kebersihan	OH	100.000
	3.2 Jasa Tenaga Keamanan		
	a. Jasa Tenaga Keamanan	OH	100.000
	b. Jasa Foreder/Patwal dari unsur Polri/TNI		
	1). Dalam Kabupaten Solok dan Kota Solok	Kali/ Kegiatan	500.000
	2). Dalam Kabupaten Solok untuk Kecamatan Pantai Cermin, Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti	Kali/ Kegiatan	700.000
	3). Luar Kabupaten Solok Dalam Propinsi	Kali/ Kegiatan	900.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	3.3 Jasa Tenaga Kesehatan		
	a. Jasa Tenaga Kesehatan	OH	100.000
	b. Jasa Tenaga Penyemprotan (<i>Fogging</i>)	OH	150.000
	c. Dokter dalam rangka pemeriksaan Haji	OK	875.000
	d. Tenaga Kesehatan dalam rangka pemeriksaan Haji	OK	800.000
	3.4 Jasa Laundry		
	a. Jasa <i>Laundry</i>	Kg	10.000
	b. Jasa <i>Laundry</i>	Set	35.000
	3.5 Jasa Bongkar Muat	Koli	2.000
4.	Belanja Jasa Tenaga Ahli		
	4.1 Jasa Tenaga Ahli Advokat		
	a. Jasa Advokat Bidang Perdata/Pidana/ Tata Usaha Negara		
	1). Pengadilan Tingkat Pertama	Per Kasus	35.000.000
	2). Pengadilan Tingkat Banding	Per Kasus	7.500.000
	3). Pengadilan Tingkat Kasasi	Per Kasus	7.500.000
	b. Jasa Advokat untuk kasus tertentu di luar pengadilan	Per Kasus	2.500.000
	4.2 Jasa Tenaga Terampil Bidang Pertanian		
	a. Tenaga Terampil Pembudidayaan Tanaman Berumur Panjang	OB	230.000
	b. Tenaga Terampil <i>Roguing</i> Padi	OH	100.000
	c. Tenaga Terampil Penjemuran Padi	OH	100.000
	d. Tenaga Terampil Pengipasan Padi	OH	100.000
	e. Tenaga Laboratorium Uji Benih Padi	Kg	7
	4.3 Jasa Tenaga Ahli Jaksa Pengacara Negara (JPN)	Orang/Kali Sidang	700.000
5.	Belanja Jasa Teknologi Informasi		
	5.1 Jasa Teknologi Informasi - Programmer		
	a. Program Pemula	OB	2.000.000
	b. Program Pemula Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Programmer Kompeten	OB	3.000.000
	d. Programmer Mahir	OB	4.500.000
	e. Programmer Ahli	OB	6.000.000
	5.2 Jasa Teknologi Informasi - Teknisi Jaringan		
	a. Teknisi Jaringan Tingkat Dasar	OB	2.000.000
	b. Teknisi Jaringan Tingkat Lanjut	OB	2.500.000
	c. Teknisi Jaringan Tingkat Menengah	OB	3.000.000
	d. Teknisi Jaringan Tingkat Mahir	OB	4.000.000
	e. Teknisi Jaringan Tingkat Ahli	OB	5.000.000
6.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		
	6.1 Jasa Pemrosesan Sampah	Ton	20.000
	6.2 Jasa Pemusnahan Obat <i>Expired</i>	Kg	25.000
7.	Belanja Jasa Penyiar Radio	OJ	10.000
8.	Belanja Jasa <i>Assesment</i>		
	8.1 Uji Kompetensi Seleksi Terbuka	Orang	2.000.000

4 P

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
9.	Belanja Jasa Retribusi		
9.1	Retribusi Sampah	Bulan	150.000
9.2	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Buangan Limbah Fasyankes	Sampel	400.000
9.3	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Minum/Bersih (mikrobiologi)	Sampel	100.000
9.4	Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air Minum/Bersih (lengkap)	Sampel	35.000
10.	Belanja Jasa Audit ISO		
10.1	Audit ISO Pelayanan Sekretariat	Paket	10.000.000
10.2	Audit ISO Pelayanan Penanaman Modal	Paket	10.000.000
10.3	Audit ISO Pelayanan Ketenagakerjaan	Paket	10.000.000
10.4	Audit ISO Pelayanan Perizinan	Paket	10.000.000
11.	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi		
11.1	Jasa Konsultasi Penilaian/ <i>Appraisal</i>	Paket	50.000.000
12.	Belanja Jasa Konsultan Perencanaan dan Konsultan Pengawasan		
12.1	Jasa Konsultan Perencanaan Kontruksi (<i>Non Gedung Negara</i>)		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	9.000.000
	b. Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	18.000.000
	c. Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	20.000.000
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	30.000.000
	e. Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	40.000.000
	f. Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.00	Paket	50.000.000
	g. Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	60.000.000
	h. Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	70.000.000
	i. Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	80.000.000
	j. Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	90.000.000
	k. Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	100.000.000
	l. Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	120.000.000
	m. Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	140.000.000
	n. Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	160.000.000
	o. Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	180.000.000
	p. Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	200.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	230.000.000
	r. Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	260.000.000
	s. Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	290.000.000

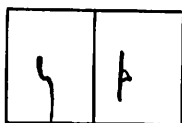
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	t. Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	320.000.000
	u. Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	350.000.000
	12.2 Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi (Non Gedung Negara)		
	a. Nilai Fisik dari 0 s.d Rp. 50.000.000	Paket	5.265.000
	b. Nilai Fisik dari Rp.50.000.001 s.d Rp.100.000.000	Paket	10.530.000
	c. Nilai Fisik dari Rp.100.000.001 s.d Rp.200.000.000	Paket	11.700.000
	d. Nilai Fisik dari Rp.200.000.001 s.d Rp.500.000.000	Paket	17.550.000
	e. Nilai fisik dari Rp.500.000.001 s.d Rp.750.000.000	Paket	23.400.000
	f. Nilai Fisik dari Rp.750.000.001 s.d Rp.1.000.000.000	Paket	29.250.000
	g. Nilai Fisik dari Rp.1.000.000.001 s.d Rp.1.500.000.000	Paket	35.100.000
	h. Nilai Fisik dari Rp.1.500.000.001 s.d Rp.2.000.000.000	Paket	40.950.000
	i. Nilai Fisik dari Rp.2.000.000.001 s.d Rp.3.000.000.000	Paket	46.800.000
	j. Nilai Fisik dari Rp.3.000.000.001 s.d Rp.4.000.000.000	Paket	52.650.000
	k. Nilai Fisik dari Rp.4.000.000.001 s.d Rp.5.000.000.000	Paket	58.500.000
	l. Nilai Fisik dari Rp.5.000.000.001 s.d Rp.6.000.000.000	Paket	70.200.000
	m. Nilai Fisik dari Rp.6.000.000.001 s.d Rp.7.000.000.000	Paket	81.900.000
	n. Nilai Fisik dari Rp.7.000.000.001 s.d Rp.8.000.000.000	Paket	93.600.000
	o. Nilai Fisik dari Rp.8.000.000.001 s.d Rp.9.000.000.000	Paket	105.300.000
	p. Nilai Fisik dari Rp.9.000.000.001 s.d Rp.10.000.000.000	Paket	117.000.000
	q. Nilai Fisik dari Rp.10.000.000.001 s.d Rp.12.000.000.000	Paket	134.550.000
	r. Nilai Fisik dari Rp.12.000.000.001 s.d Rp.14.000.000.000	Paket	152.100.000
	s. Nilai Fisik dari Rp.14.000.000.001 s.d Rp.16.000.000.000	Paket	169.650.000
	t. Nilai Fisik dari Rp.16.000.000.001 s.d Rp.18.000.000.000	Paket	187.200.000
	u. Nilai Fisik dari Rp.18.000.000.001 s.d Rp.20.000.000.000	Paket	204.750.000
13.	Belanja Jasa Konsultan Survey		
	13.1 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jalan	Km	500.000
	13.2 Jasa Konsultan Survey Kondisi Jembatan	Unit	1.000.000
14.	Belanja Jasa Uji		
	14.1 Jasa Uji sterilitas langsung	Sampel	530.000
	14.2 Jasa Uji sterilitas secara penyaringan	Sampel	1.030.000
	14.3 Jasa Uji potensi antibiotik	Sampel	780.000
	14.4 Jasa Uji Labor Peptisida	Sampel	900.000

4	1
---	---

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
15.	Belanja Jasa Uji Pangan		
	15.1 Penetapan Kadar Siklamat secara Gravimetri (AT Kelas M2 2 kg)	Unit	100.000
	15.2 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklamat secara KCKT (AT Kelas M2 1mg-1kg)	Set	1.250.000
	15.3 Identifikasi Siklamat secara KLT (AT Kelas M1 20 kg)	Unit	50.000
	15.4 Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofometri (AT Kelas M1 10 kg)	Unit	50.000
	15.5 Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat Sorbat) secara KCKT (Termocouple)	Unit	225.000
	15.6 Penetapan Kadar Coffein secara KCKT (AT Miligram M2)	Set	600.000
	15.7 Penetapan Kadar Abu (Remidi Dacin M2)	Set	650.000
	15.8 Penetapan Kadar Air (Standar Dacin s/d 110 kg M1)	Set	350.000
	15.9 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd) (AT Bidur Kap. 20 kg M2)	Unit	50.000
	15.10 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As) (AT Kelas M2 20 kg)	Unit	100.000
	15.11 Uji pH secara pH-meter (AT Kelas M2 10 kg)	Unit	100.000
	15.12 Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri (AT Kelas M2 5 kg)	Unit	100.000
	15.13 Penetapan Kadar Pengawet (Benzoat Sorbat) secara KCKT (15 Hari)	Sampel	680.000
	15.14 Penetapan Kadar Coffein secara KCKT (15 Hari)	Sampel	680.000
	15.15 Penetapan Kadar Abu (10 Hari)	Sampel	230.000
	15.16 Penetapan Kadar Air (10 Hari)	Sampel	130.000
	15.17 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Pb, Cd) (15 Hari)	Sampel	430.000
	15.18 Penetapan Kadar Logam Berat secara AAS (Hg, Sn, As) (15 Hari)	Sampel	530.000
	15.19 Uji pH secara pH-meter (10 Hari)	Sampel	105.000
	15.20 Penetapan Kadar Nitrit secara Spektrofotometri (12 Hari)	Sampel	430.000
	15.21 Penetapan Kadar Siklamat secara Gravimetri (15 Hari)	Sampel	330.000
	15.22 Identifikasi/Penetapan Kadar Siklamat secara KCKT (15 Hari)	Sampel	930.000
	15.23 Identifikasi Siklamat secara KLT (15 Hari)	Sampel	320.000
	15.24 Identifikasi Rhodamin B secara Spektrofometri (15 Hari)	Sampel	530.000
	15.25 Identifikasi Pewarna Sintesis secara KLT (15 Hari)	Sampel	330.000
	15.26 Identifikasi Borax secara Spektrofotometri (15 Hari)	Sampel	630.000
	15.27 Identifikasi Formalin destilasi (12 Hari)	Sampel	200.000
	15.28 Uji vibrio cholerae pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	15.29 Uji Staphylococcus qureus pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	15.30 Uji salmonella pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	15.31 Uji MPN E. Coli Pangan (15 Hari)	Sampel	630.000
	15.32 Uji MPN coliform pangan/fecal coliform pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	15.33 Uji listeria monocytogenes pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	15.34 Uji enterobacter sakazakil pangan (15 Hari)	Sampel	880.000
	15.35 Uji E. Coli pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	15.36 Uji clostridium perfringnes pangan (15 Hari)	Sampel	580.000

7	1
---	---

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	15.37 Uji bacillus pangan (15 Hari)	Sampel	580.000
	15.38 Uji Staphylococcus qureus pangan (15 Hari)	Sampel	780.000
	15.39 Uji angka coliform pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	15.40 Uji angka kapang khamir pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	15.41 Uji angka lempeng total pangan (15 Hari)	Sampel	280.000
	15.42 Penetapan Kadar Alkhohol pada pangan (15 Hari)	Sampel	530.000
16.	Belanja Jasa Uji NAPZA		
	16.1 Ganja (3 Hari)	Sampel	400.000
	16.2 Shabu (4 Hari)	Sampel	650.000
	16.3 Ekstasi (5 Hari)	Sampel	650.000
17.	Biaya Jasa Uji Potensi dan Sterilitas		
	17.1 Uji potensi antibiotic (15 hari)	Sampel	780.000
	17.2 Uji sterilitas secara penyaringan (15 hari)	Sampel	1.030.000
	17.3 Uji sterilitas langsung (15 hari)	Sampel	530.000
18.	Belanja Jasa Uji Obat		
	18.1 Uji dissolusi obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	780.000
	18.2 Uji dissolusi obat secara Spektrofotometri (15 hari)	Sampel	530.000
	18.3 Penetapan Kadar Obat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.4 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis dengan derivatisasi (15 hari)	Sampel	430.000
	18.5 Penetapan Kadar Obat secara Spektrofotometri UV-Vis (15 hari)	Sampel	280.000
	18.6 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri dengan potensiometri (15 hari)	Sampel	530.000
	18.7 Penetapan Kadar Obat secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	18.8 Uji staphylococcus aureus obat tradisional (15 hari)	Sampel	580.000
	18.9 Uji slamoneia obat tradisional (15 hari)	Sampel	630.000
	18.10 Uji pseudomonas aeruginosa obat tradisional (15 hari)	Sampel	430.000
	18.11 Uji E-Coli obat tradisional (15 hari)	Sampel	530.000
	18.12 Uji clostridum perfringnes obat tradisional (15 hari)	Sampel	680.000
	18.13 Uji angka kapang khamir obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	18.14 Uji angka lempeng total obat tradisional (15 hari)	Sampel	330.000
	18.15 Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.16 Penetapan Kadar Etanol-Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
	18.17 Penetapan Kadar Vitamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.18 Penetapan Kadar Koffein secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.19 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
	18.20 Identifikasi Bahan Kimia Obat (BKO) secara KLT dengan densitometer (10 hari)	Sampel	430.000
	18.21 Penetapan Kadar Air (6 hari)	Sampel	130.000
	18.22 Keseragaman Bobot (6 hari)	Sampel	90.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
19.	Belanja Jasa Uji Kosmetik		
19.1	Uji staphylococcus qureus kosmetik (15 hari)	Sampel	580.000
19.2	Uji pseudomonas aeruginosa kosmetik (15 hari)	Sampel	480.000
19.3	Uji clostridium perfringnes kosmetik (15 hari)	Sampel	680.000
19.4	Uji candida albicans kosmetik (15 hari)	Sampel	380.000
19.5	Uji angka kapang khamir kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
19.6	Uji angka lempeng total kosmetik (15 hari)	Sampel	330.000
19.7	Penetapan Kadar Oksibenzon secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
19.8	Penetapan Kadar Asam Salisilat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.9	Penetapan Kadar Pengawet secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.10	Penetapan Kadar Oktil Metoksi Sinamat secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.11	Identifikasi Para Amino Benzoic Acid secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.12	Identifikasi ketonazol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.13	Identifikasi Benzol peroksida secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.14	Identifikasi Clindamisin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.15	Identifikasi Teofilin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.16	Fitonadion secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.17	Penetapan Kadar p-fenilendiamin secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.18	Penetapan Kadar Resorcinol secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.19	Penetapan Kadar Triklosan (TCC) secara KCKT (15 hari)	Sampel	680.000
19.20	Penetapan Kadar Metanol secara GC (15 hari)	Sampel	530.000
19.21	Uji Logam Berat secara AAS (15 hari)	Sampel	230.000
19.22	Identifikasi Hexaclorofen secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.23	Identifikasi Asam Salisilat secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.24	Ident DEG secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.25	Identifikasi Kloramfenikol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.26	Identifikasi Bitional secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.27	Identifikasi Steriod secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.28	Identifikasi Asam Retinoat secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
19.29	Identifikasi Hidrokinon secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.30	Identifikasi Naphtol Grees B secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.31	Identifikasi Naphtol Blue Black secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.32	Identifikasi Sudan II dan III secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.33	Identifikasi Naphtol Yellow S secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
19.34	Identifikasi Meta- fenilendiamin secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000

4 A

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	19.35 Identifikasi Orto-fenilendiamin secara KLT dengan densitometer	Sampel	430.000
	19.36 Identifikasi Sudan IV secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.37 Identifikasi Pirogalol secara KLT dengan densitometer (15 hari)	Sampel	430.000
	19.38 Identifikasi Pewarna (15 hari)	Sampel	430.000
	19.39 Penetapan Kadar Hidrogen Peroksida secara Volumeteri (15 hari)	Sampel	280.000
	19.40 Penetapan Kadar Zn PtO secara Volumetri (15 hari)	Sampel	280.000
	19.41 Identifikasi Asam Borat secara Reaksi Nyala (15 hari)	Sampel	100.000
	19.42 Identifikasi Timbal (Pb) secara Reaksi Pengendapan (15 hari)	Sampel	130.000
	19.43 Uji pH secara pH-meter (10 hari)	Sampel	105.000
20.	Belanja Jasa Kalibrasi Peralatan Kesehatan		
	20.1 Tabung Oksigen	Unit	228.000
	20.2 Syringe Pump	Unit	228.000
	20.3 Alat Hisap Medis (Suction Pump)	Unit	144.000
	20.4 Stirrer	Unit	156.000
	20.5 Sterilisator Kering	Unit	204.000
	20.6 Sterilisator Basah	Unit	204.000
	20.7 Static Cycle	Unit	168.000
	20.8 Spirometer	Unit	156.000
	20.9 Tensimeter (Sphygmomanometer)	Unit	84.000
	20.10 Spectrophotometer	Unit	192.000
	20.11 Short Wave Diathermy/Micro Wave Diathermy	Unit	312.000
	20.12 Patient Warming System	Unit	170.000
	20.13 Pulse Oximetri (SPO2, Monitor)	Unit	180.000
	20.14 Photometer	Unit	168.000
	20.15 Phono Cardiograph	Unit	156.000
	20.16 Paraffin Bath	Unit	252.000
	20.17 Oven	Unit	396.000
	20.18 Mensin Anaesthesi tanpa Vaporizer tanpa Ventilator	Unit	228.000
	20.19 Laboratorium Rotator	Unit	144.000
	20.20 Laboratorium Refrigerator	Unit	252.000
	20.21 Laboratorium Inkubator	Unit	252.000
	20.22 Inkubator Perawatan	Unit	324.000
	20.23 Infusion Pump	Unit	288.000
	20.24 Infant Warmer	Unit	240.000
	20.25 Heart Rate Monitor	Unit	300.000
	20.26 Haemodialisa	Unit	216.000
	20.27 Freezer Laboratorium	Unit	396.000
	20.28 Fetal Detector/Doppler	Unit	156.000
	20.29 Ear Nose Trough (ENT) Treatment	Unit	156.000
	20.30 Electrocardiograph (ECG)	Unit	180.000
	20.31 Electro Surgery Unit (ESU)/Couter	Unit	348.000
	20.32 Electro Mygraph (EMG)	Unit	258.000
	20.33 Electro Encephalograph (EEG)	Unit	420.000
	20.34 Electro Convulsion Therapy (ECT)	Unit	288.000
	20.35 Electro Stimulator (ESTI)	Unit	288.000
	20.36 Echo Cardiograph	Unit	288.000
	20.37 Electrocardiograph (ECG) Monitor	Unit	168.000
	20.38 Dental Unit	Unit	168.000

4	1
---	---

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	20.39 Defibrillator Monitor	Unit	300.000
	20.40 Defibrillator with Electrocardiograph (ECG) with SPO2	Unit	400.000
	20.41 Defibrillator with Electrocardiograph (ECG)	Unit	300.000
	20.42 Defibrillator/DC Shock	Unit	156.000
	20.43 Deep Freezer	Unit	384.000
	20.44 Centrifuge Refrigerator	Unit	420.000
	20.45 Centrifuge	Unit	240.000
	20.46 Cardiotocograph (CTG)	Unit	168.000
	20.47 Carbon Dioxide (CO2) Laser Sugery	Unit	144.000
	20.48 Blood Wamer	Unit	216.000
	20.49 Blood Solution Warmer	Unit	216.000
	20.50 Blood Pressure Monitor (BPM/Non Infasive Bloud Pressure Monitor (NIBP Monitor)	Unit	162.000
	20.51 Blood Bank	Unit	252.000
	20.52 Monitor Pasien (Bed Side Monitor)	Unit	588.000
	20.53 Bed Side with Defibrillator	Unit	620.000
	20.54 Anti Decubitus	Unit	120.000
	20.55 Autoclave	Unit	312.000
	20.56 Audiometer	Unit	396.000
	20.57 Suction Gas Medis	Unit	720.000
	20.58 Oksigen (O2)	Unit	792.000
	20.59 Nebulizer with Suction	Unit	310.000
	20.60 Nebulizer	Unit	228.000
	20.61 Dental X-Ray	Unit	950.000
	20.62 Traksi	Unit	168.000
	20.63 Triadmill	Unit	168.000
	20.64 Treadmill with Electrocardiograph (ECG) Cardiac Stress Test	Unit	250.000
	20.65 Ultrasonography (USG)	Unit	300.000
	20.66 Ultra Sound Therapy (UST)	Unit	216.000
	20.67 Vacuum Extractor	Unit	168.000
	20.68 Ventilator/Continous Positive Airways Pressure (CPAP)/Respirator Rate/Ventilator Anaesthesi	Unit	396.000
	20.69 Water Bath	Unit	216.000
	20.70 After Loading/Brachyterapy	Unit	2.280.000
	20.71 Angiography	Unit	1.000.000
	20.72 Bone Desitometer	Unit	948.000
	20.73 CT-Scan	Unit	1.044.000
	20.74 Timpanometer	Unit	264.000
	20.75 Dental X-Ray Panasonic	Unit	600.000
	20.76 Dental X-Ray Panasonic with Cephalometric	Unit	700.000
	20.77 General Purpose X-Ray	Unit	1.032.000
	20.78 General Purpose X-Ray with Automatic Computed (AEC)	Unit	1.440.000
	20.79 MCS X-Ray	Unit	622.000
	20.80 Mobile C-Arm X-Ray	Unit	1.008.000
	20.81 Mobile Unit X-Ray	Unit	876.000
	20.82 Simulator/Therapy fPlanning	Unit	1.032.000
	20.83 Tomography	Unit	828.000
	20.84 X-Ray Fluoroscopy (Dual Fungsi R/F)	Unit	1.116.000
	20.85 X-Ray Mammography	Unit	912.000
	20.86 X-Ray Therapy	Unit	848.000
21.	Belanja Jasa Kalibrasi Standar Metriologi		
	21.1 AT Miligram M2	Set	600.000
	21.2 Remidi Dacin M2	Set	650.000
	21.3 Standar Dacin s/d 110 kg M1	Set	350.000

9 1

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	21.4 AT Kelas M2 (1mg - 1 kg	Set	1.250.000
	21.5 AT Kelas M1 (1 mg - 1 kg)	Set	1.250.000
	21.6 AT Kelas F2 (1 mg - 1 kg)	Set	1.875.000
	21.7 Termocouple	Unit	225.000
	21.8 AT Bidur Kap. 20 kg M2	Unit	50.000
	21.9 AT Kelas M2 20 kg	Unit	100.000
	21.10 AT Kelas M2 10 kg	Unit	100.000
	21.11 AT Kelas M2 5 kg	Unit	100.000
	21.12 AT Kelas M2 2 kg	Unit	100.000
	21.13 AT Kelas M1 20 kg	Unit	50.000
	21.14 AT Kelas M1 10 kg	Unit	50.000
	21.15 AT Kelas M1 5 kg	Unit	50.000
	21.16 AT Kelas M1 2 kg	Unit	50.000
	21.17 TE Presisi Kap. 220 g	Unit	225.000
	21.18 TE Presisi Kap. 6.2 kg	Unit	225.000
	21.19 TE Presisi Kap. 30 kg	Unit	225.000
	21.20 BUS Kelas III Kap. 20 liter	Unit	95.000
	21.21 BUS Kelas III Kap. 10 liter	Unit	95.000
	21.22 Jangka Sorong 300 mm	Unit	150.000
22.	Belanja Jasa Uji Lingkungan Hidup		
	22.1 Jasa Uji Total Dissolved Solid	Sampel/Item	75.000
	22.2 Jasa Uji Biochemical Oxygen Demand	Sampel/Item	60.000
	22.3 Jasa Uji Chemical Oxygen Demand	Sampel/Item	60.000
	22.4 Jasa Uji Total Suspended Solid	Sampel/Item	60.000
	22.5 Jasa Uji Phospat	Sampel/Item	60.000
	22.6 Jasa Uji Dissolved Oxygen	Sampel/Item	60.000
	22.7 Jasa Uji Nitrat	Sampel/Item	60.000
	22.8 Jasa Uji Nitrit	Sampel/Item	50.000
	22.9 Jasa Uji E-Coll	Sampel/Item	50.000
	22.10 Jasa Uji Sulfat	Sampel/Item	85.000
	22.11 Jasa Uji Klorida	Sampel/Item	85.000
	22.12 Jasa Uji Warna	Sampel/Item	85.000
	22.13 Jasa Uji Kekeuruhan	Sampel/Item	85.000
	22.14 Jasa Uji Kalibrasi Lemari Asam	Sampel/Item	8.500.000
	22.15 Jasa Uji Kalibrasi Alat Destilasi	Sampel/Item	5.000.000
	22.16 Jasa Uji Sisa Klorbebas	Sampel/Item	25.000
	22.17 Jasa Uji Sulfida	Sampel/Item	40.000
	22.18 Jasa Uji Besi	Sampel/Item	85.000
	22.19 Jasa Uji Oksigen Terabsorbsi	Sampel/Item	85.000
	22.20 Jasa Uji Suhu	Sampel/Item	85.000
	22.21 Jasa Uji Salinitas	Sampel/Item	85.000
	22.22 Jasa Uji Aluminium	Sampel/Item	85.000
	22.23 Jasa Uji Seng	Sampel/Item	85.000
	22.24 Jasa Uji Tembaga	Sampel/Item	85.000
	22.25 Jasa Uji Timbal	Sampel/Item	85.000
	22.26 Jasa Uji Mangan	Sampel/Item	85.000
	22.27 Jasa Uji Perak	Sampel/Item	85.000
	22.28 Jasa Uji Magnesium	Sampel/Item	85.000
	22.29 Jasa Uji Ammoniak Bebas	Sampel/Item	85.000
	22.30 Jasa Uji Ph	Sampel/Item	85.000
	22.31 Jasa Uji Total Fosfat	Sampel/Item	85.000
	22.32 Jasa Uji Klorbebas	Sampel/Item	85.000
	22.33 Jasa Uji Sianida	Sampel/Item	85.000
	22.34 Jasa Uji Total Nitrogen	Sampel/Item	85.000
	22.35 Jasa Uji Total Coli	Sampel/Item	85.000
	22.36 Jasa Uji Fecal Coli	Sampel/Item	85.000
	22.37 Jasa Uji Coliform	Sampel/Item	85.000

4	h
---	---

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
23.	Belanja Jasa Uji Aspal dan Beton		
	23.1 Coredrill Aspal	Titik	67.000
	23.2 Kepadatan/Density Aspal	Sampel	30.000
	23.3 Ekstraksi Aspal	Sampel	35.000
	23.4 Coredrill Beton	Titik	67.000
	23.5 Kuat Tekan Beton (Sampel Core)	Sampel	209.500
	23.6 Pemotongan Beton	Per Sisi	20.000
	23.7 Kuat Tekan Beton (Sampel Silindris)	Sampel	114.000
	23.8 Biaya Belerang (Per 1 Kg untuk 3 Sampel)	Kg	45.000
	23.9 Laporan Hasil Pengujian	Laporan	50.000
24.	Belanja Jasa Uji Luas Area dengan Alat Ukur		
	24.1 Luas Lahan	Ha	1.500.000
25.	Belanja Jasa Premi Asuransi		
	25.1 Premi Peserta di daftarkan Pemda	Orang	37.800
	25.2 Premi JKSS <i>sharing</i> 80.20	Orang	30.800
	25.3 Premi Peserta PBPU/Umum Subsidi Pemda	Orang	2.800
	25.4 Biaya Asuransi Barang Milik Daerah (Bangunan)	Paket	200.000.000
	22.5 Biaya Asuransi Barang Milik Daerah (Kendaraan)	Unit	5.000.000
26.	Belanja Jasa Iklan (Promosi)		
	26.1 Media Cetak		
	a. Media Cetak Harian		
	- Halaman Depan	Kali	3.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih 1 Halaman	Kali	6.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ½ Halaman	Kali	3.500.000
	- Berwarna/Hitam Putih ¼ Halaman	Kali	2.000.000
	b. Media Cetak Mingguan		
	- Hitam Putih 1 Halaman	Kali	2.500.000
	- Hitam Putih ½ Halaman	Kali	1.500.000
	- Hitam putih ¼ Halaman	Kali	750.000
	- Berwarna 1 Halaman	Kali	3.000.000
	- Berwarna ½ Halaman	Kali	2.000.000
	- Berwarna ¼ Halaman	Kali	1.000.000
	26.2 Radio		
	a. Radio Spot	Unit	15.000.000
	b. Gelombang Radio	M2/Thn	5.000.000
27.	Belanja Jasa Mediko Legal		
	27.1 Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Repertum		
	a. Jasa Pemeriksaan Korban Hidup	OK	765.000
	b. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Luar	OK	900.000
	c. Jasa Pemeriksaan Korban Meninggal untuk Pemeriksaan Dalam (Otopsi)	OK	3.681.000
	d. Jasa Pemeriksaan Penunjang	OK	5.200.000
	27.2 Biaya Jasa Mediko Legal untuk Visum et.Psikiatrikum	OK	500.000
28.	Belanja Jasa Medis		
	28.1 Akseptor untuk Implan	OK	100.000
	28.2 Akseptor untuk Metode Operasi Wanita (MOW)	OK	1.555.300
	28.3 Akseptor untuk Metode Operasi Pria (MOP)	OK	350.000

7 A

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
29.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial		
	29.1 Jasa Pemakaman Mayat Terlantar	Kegiatan	1.000.000
	29.2 Petugas Penguburan Jenazah Pasien Covid-19	OH	500.000
	29.3 Petugas Mobil Jenazah	OH	500.000
30.	Belanja Jasa untuk Ajudan Bupati/Wakil Bupati dari unsur TNI/POLRI		
	30.1 Ajudan Bupati	OB	2.750.000
	30.2 Ajudan Wakil Bupati	OB	2.500.000

4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

- Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- Perjalanan dinas dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dan atau Kegiatan Kepentingan Pemerintah daerah.
(Non PNS adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan Pihak lainnya yang dibayar dengan APBD).
- Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Bimtek, Seminar, Sosialisasi dan sejenisnya:
 - Pelaksanaan yang tidak lebih dari 4 (empat) hari maka besaran uang hariannya disamakan dengan biaya perjalanan dinas biasa.
 - Pelaksanaan yang lebih dari 4 (Empat) hari, maka besaran uang harian untuk hari pertama dan hari terakhir diberikan 100% perhari, uang harian untuk hari kedua dan berikutnya diberikan 75% perhari.
 - Apabila dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud peserta membayarkan uang kontribusi kepada panitia pelaksana, maka uang harian pertama dan hari terakhir diberikan 100% perhari, uang harian untuk hari kedua dan berikutnya diberikan 75% perhari.
- Perjalanan dinas dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Ketua PKK (jabatan yang bersifat *ex officio* seperti: Dekranasda, P2TP2A, Forikan, Bunda Paud, Bunda Literasi, Himpaudi, GOW, LKKS dll), Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau lainnya maka biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.
- Perjalanan Dinas Istri Bupati, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekretaris Daerah dengan ketentuan:
 - Istri Bupati/Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks biaya tiket dan penginapan disamakan dengan Bupati/Wakil Bupati.
 - Istri Bupati/Istri Wakil Bupati yang ikut mendampingi Bupati/Wakil Bupati serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks uang harian perjalanan dinas disamakan dengan Eselon II.b.
 - Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta dalam tugas keorganisasiannya untuk indeks biaya perjalanan dinas disamakan dengan PNS Esselon III.
- Perjalanan dinas yang mengikut sertakan Pihak Lain seperti Wali Nagari, Organisasi, Kelompok Tani, Murid Teladan dan/atau lainnya biaya perjalanan dinas disamakan dengan biaya perjalanan dinas Non PNS.

7. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama biaya perjalanan dinasnya dapat dibayarkan pada kegiatan perangkat daerah yang bersangkutan.
8. Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama untuk biaya perjalanan dinasnya disamakan dengan PNS Eselon II.b, bila diwakilkan biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan Golongan peserta yang mewakili.
9. Pengurus Organisasi atau Lembaga tingkat Kabupaten biaya perjalanan dinasnya dengan uraian sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1.	Ketua Harian	OH	PNS EselonIII
2.	Wakil Ketua	OH	PNS Eselon III
3.	Sekretaris	OH	PNS Gol. III
4.	Bendahara	OH	PNS Gol. III
5.	Pengurus Lainnya/Anggota/Peserta	OH	PNS Gol. II

4.1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA

Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk membiayai belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI

4.1.1.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	380.000
2.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	OH	370.000
3.	Anggota DPRD, Eselon IIb	OH	360.000
4.	Eselon III, Fungsional Tertentu Madya dan Staf Golongan IV	OH	350.000
5.	Eselon IV, Fungsional Tertentu Muda/Pratama/Penyelia dan Staf Golongan III	OH	340.000
6.	Staf Golongan II/I dan Fungsional Tertentu Pelaksana	OH	330.000
7.	Non PNS	OH	300.000
8.	Diklat	OH	110.000

4.1.1.2. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	OH	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	75.000

Keterangan :

Untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

4.1.1.3. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	2.600.000
2	Wakil dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	2.400.000
3	Pejabat Eselon III/Gol.IV	OH	1.353.000
4	Pejabat Eselon IV/Gol.III/II/I	OH	650.000

Keterangan :

1. Di samping biaya perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Kabupaten dalam Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.1.3.
2. Besaran biaya penginapan untuk Non PNS disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud dalam angka 3 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.1.3.

4.1.1.4. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription <i>Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) dan/atau pemeriksaan <i>Covid-19</i> lainnya	OK	525.000

Keterangan

Satuan biaya Swab Antigen (Rapid Test Antigen) dan Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau pemeriksaan *Covid-19* lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satu kali test. Satuan biaya untuk pemeriksaan Swab Antigen (Rapid Test Antigen) dan Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau pemeriksaan *Covid-19* lainnya diberikan dalam bentuk *at cost*, maksimal sesuai dengan tabel 4.1.1.4.

4.1.2. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR PROPINSI

Lamanya perjalanan dinas luar propinsi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) hari perjalanan kecuali untuk pelatihan atau kegiatan yang sudah ditentukan jadwal pelaksanaannya. Perjalanan dinas dihitung 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari sesudah kegiatan.

Pelaksanaan perjalanan dinas luar provinsi dapat dilaksanakan dengan kriteria :

- a. Adanya Undangan
- b. *Force Majeur* (Kondisi di luar kendali)
- c. Perintah/Persetujuan Kepala Daerah.

- d. Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan persetujuan pimpinan DPRD

4.1.2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	360.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000
3.	Riau	OH	370.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000
5.	Jambi	OH	370.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000
8.	Lampung	OH	380.000
9.	Bengkulu	OH	380.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000
11.	Banten	OH	370.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000
13.	DKI Jakarta	OH	530.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	420.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000
17.	Bali	OH	480.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000
26.	Gorontalo	OH	370.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000
31.	Maluku	OH	380.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000
33.	Papua	OH	580.000
34.	Papua Barat	OH	480.000

Keterangan :

Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal dan uang saku

4.1.2.2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Aceh	OH	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	110.000
3.	Riau	OH	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	110.000
5.	Jambi	OH	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	110.000
8.	Lampung	OH	110.000
9.	Bengkulu	OH	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	120.000
11.	Banten	OH	110.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
12.	Jawa Barat	OH	130.000
13.	DKI Jakarta	OH	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	110.000
15.	D.I Yogyakarta	OH	130.000
16.	Jawa Timur	OH	120.000
17.	Bali	OH	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	110.000
26.	Gorontalo	OH	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	110.000
31.	Maluku	OH	110.000
32.	Maluku Utara	OH	130.000
33.	Papua	OH	170.000
34.	Papua Barat	OH	140.000

4.1.2.3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	OH	250.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000

Keterangan :

Untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

4.1.2.4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN

NO.	PROVINSI	SATUAN	Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Wakil dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
1	Aceh	OH	2.600.000	2.400.000	1.294.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	2.600.000	1.518.000	1.100.000	530.000
3	Riau	OH	2.600.000	2.400.000	1.650.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.600.000	1.854.000	1.037.000	792.000
5	Jambi	OH	2.600.000	2.400.000	1.212.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.353.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	1.571.000	861.000
8	Lampung	OH	2.600.000	2.067.000	1.140.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	2.600.000	2.400.000	1.957.000	622.000
11	Banten	OH	2.600.000	2.373.000	1.000.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.006.000	570.000
13	DKI Jakarta	OH	2.600.000	1.490.000	992.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	2.600.000	1.480.000	954.000	600.000
15	D.I Yogyakarta	OH	2.600.000	2.400.000	1.384.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	2.600.000	1.605.000	1.076.000	664.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Wakil dan Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol. IV	Pejabat Eselon IV/ Gol. III/II/I
1	2	3	4	6	7	8
17	Bali	OH	2.600.000	1.946.000	990.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.418.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	2.600.000	1.493.000	1.355.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.600.000	1.538.000	1.125.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	2.600.000	2.400.000	1.160.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.600.000	2.400.000	1.500.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	2.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	2.600.000	2.188.000	1.507.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	2.600.000	2.290.000	924.000	782.000
26	Gorontalo	OH	2.600.000	2.400.000	1.431.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	2.600.000	2.400.000	1.075.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	2.600.000	1.550.000	1.020.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000
31	Maluku	OH	2.600.000	2.400.000	1.048.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	2.600.000	2.400.000	1.073.000	600.000
33	Papua	OH	2.600.000	2.400.000	2.400.000	829.000
34	Papua Barat	OH	2.600.000	2.400.000	2.056.000	718.000

Keterangan :

1. Di samping biaya perjalanan dinas, Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas Luar Propinsi dapat diberikan biaya penginapan yang dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.2.4.
2. Besaran biaya penginapan untuk Non PNS disamakan dengan PNS Golongan II.
3. Dalam hal Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh peserta dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
4. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada poin 4 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka para peserta menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
5. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.2.4.

4.1.2.5. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PULANG PERGI (PP)

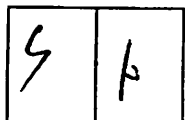
NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS					EKONOMI				
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4					5				
1	Padang	Banda Aceh	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Banda Aceh	7.519.000	13.049.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Banda Aceh	4.492.000	7.444.000
2	Padang	Medan	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Medan	7.252.000	12.782.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Medan	3.808.000	6.760.000
3	Padang	Pekanbaru	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Pekanbaru	5.583.000	11.113.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Pekanbaru	3.016.000	5.968.000
4	Padang	Batam	Padang- Batam	8.653.000			8.653.000	Padang- Batam	4.546.000			4.546.000
5	Padang	Pangkal Pinang	Padang- Pangkal Pinang	7.337.000			7.337.000	Padang- Pangkal Pinang	3.883.000			3.883.000
6	Padang	Palembang	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Palembang	3.861.000	9.391.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Palembang	2.268.000	5.220.000
7	Padang	Jambi	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Jambi	4.065.000	9.595.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Jambi	2.460.000	5.412.000
8	Padang	Bengkulu	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Bengkulu	4.364.000	9.894.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Bengkulu	2.621.000	5.573.000
9	Padang	Bandar Lampung	Padang- Bandar Lampung	6.439.000			6.439.000	Padang- Bandar Lampung	3.380.000			3.380.000
10	Padang	Jakarta	Padang- Jakarta	5.530.000			5.530.000	Padang- Jakarta	2.952.000			2.952.000
11	Padang	Bandung	Padang- Bandung	6.129.000			6.129.000	Padang- Bandung	3.508.000			3.508.000
12	Padang	Yogyakarta	Padang- Yogyakarta	7.969.000			7.969.000	Padang- Yogyakarta	4.000.000			4.000.000
13	Padang	Solo	Padang- Solo	7.744.000			7.744.000	Padang- Solo	4.065.000			4.065.000
14	Padang	Semarang	Padang- Semarang	7.744.000			7.744.000	Padang- Semarang	3.925.000			3.925.000
15	Padang	Malang	Padang- Malang	8.418.000			8.418.000	Padang- Malang	4.385.000			4.385.000
16	Padang	Surabaya	Padang- Surabaya	9.199.000			9.199.000	Padang- Surabaya	4.364.000			4.364.000
17	Padang	Pontianak	Padang- Pontianak	8.193.000			8.193.000	Padang- Pontianak	4.460.000			4.460.000
18	Padang	Palangkaraya	Padang- Palangkaraya	8.760.000			8.760.000	Padang- Palangkaraya	4.642.000			4.642.000

4 1

NO	KOTA		BIAYA TIKET									
	ASAL	TUJUAN	BISNIS					EKONOMI				
			RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH	RUTE PENERBANGAN I	BIAYA	RUTE PENERBANGAN II	BIAYA	JUMLAH
1	2	3	4					5				
19	Padang	Banjarmasin	Padang-Banjarmasin	9.006.000			9.006.000	Padang-Banjarmasin	4.642.000			4.642.000
20	Padang	Balikpapan	Padang-Balikpapan	10.942.000			10.942.000	Padang-Balikpapan	5.369.000			5.369.000
21	Padang	Manado	Padang- Manado	14.012.000			14.012.000	Padang- Manado	6.546.000			6.546.000
22	Padang	Gorontalo	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Gorontalo	7.231.000	12.761.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Gorontalo	4.824.000	7.776.000
23	Padang	Palu	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Palu	9.348.000	14.878.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Palu	5.113.000	8.065.000
24	Padang	Makasar	Padang- Makasar	10.974.000			10.974.000	Padang- Makasar	5.402.000			5.402.000
25	Padang	Mamuju	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Mamuju	7.295.000	12.825.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Mamuju	4.867.000	7.819.000
26	Padang	Kendari	Padang- Kendari	11.167.000			11.167.000	Padang- Kendari	5.722.000			5.722.000
27	Padang	Denpasar	Padang- Denpasar	9.049.000			9.049.000	Padang- Denpasar	4.888.000			4.888.000
28	Padang	Mataram	Padang- Mataram	9.060.000			9.060.000	Padang- Mataram	4.867.000			4.867.000
29	Padang	Kupang	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Kupang	9.413.000	14.943.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Kupang	5.081.000	8.033.000
30	Padang	Ambon	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Ambon	13.285.000	18.815.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Ambon	7.081.000	10.033.000
31	Padang	Ternate	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta- Ternate	10.001.000	15.531.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta- Ternate	6.664.000	9.616.000
32	Padang	Timika	Padang-Timika	16.718.000			16.718.000	Padang-Timika	8.685.000			8.685.000
33	Padang	Jayapura	Padang- Jayapura	17.381.000			17.381.000	Padang- Jayapura	9.327.000			9.327.000
34	Padang	Biak	Padang- Biak	16.932.000			16.932.000	Padang- Biak	8.728.000			8.728.000
35	Padang	Manokwari	Padang-Jakarta	5.530.000	Jakarta-Manokwari	16.226.000	21.756.000	Padang-Jakarta	2.952.000	Jakarta-Manokwari	10.824.000	13.776.000

Keterangan :

1. Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah Propinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket pesawat, tiket bus dan tiket kapal laut.
2. Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pulang-Pergi (PP) dari bandara Keberangkatan ke Bandara Kota Tujuan dapat dibayarkan dalam bentuk *at cost* sesuai dengan peruntukannya, dengan ketentuan tidak melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.2.5.



3. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya.
4. Satuan biaya tiket diberikan sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut:
 - Bisnis : Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati
 - Ekonomi : Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, III, IV, V dan staf
5. Apabila daerah tujuan tidak dapat dicapai dengan penerbangan langsung maka biaya tiket pesawat dihitung berdasarkan biaya tiket dari Padang ke Daerah tempat transit ditambah dengan biaya tiket dari tempat transit ke kota tujuan menggunakan metode *at cost* misalnya:
 - a. Biaya Transport ke Kabupaten Sleman, perhitungan biaya transportnya dihitung biaya tiket pesawat Padang-Yogyakarta ditambah dengan biaya tiket transport darat ke Kabupaten Sleman.
 - b. Biaya Transport ke Kabupaten Anambas (Propinsi Kepulauan Riau), biaya transportnya dihitung berdasarkan tiket pesawat Padang – Batam ditambah biaya transport laut dari Batam ke Kabupaten Anambas.
5. Satuan biaya transport untuk perjalanan dinas yang tidak menggunakan pesawat udara seperti transportasi darat dan air maka biaya transport dihitung secara *at cost*.
6. Biaya *airport tax* dibayarkan sesuai dengan tarif bandara.
7. Apabila biaya tiket pesawat seluruh maskapai penerbangan yang dalam kondisi melebihi angka sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1.2.5, dapat dibayarkan sebesar harga berlaku.

4.1.2.6. SATUAN BIAYA TAKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Taksi	Orang/ Kali	150.000

Keterangan :

Satuan biaya taksi perjalanan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya. Satuan biaya taksi diberikan dalam bentuk *lumpsum* maksimal sesuai dengan tabel 4.1.2.6.

Contoh :

Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya taksi sebagai berikut:

1. Berangkat
 - a. Biaya taksi dari tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor) ke Bandara Internasional Minang Kabau (BIM); dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Soekarno - Hatta (Jakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta.
2. Kembali
 - a. Biaya taksi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno - Hatta; dan
 - b. Biaya taksi dari Bandara Internasional Minang Kabau (BIM) ke tempat kedudukan (tempat tinggal/kantor).

4.1.2.7. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription <i>Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) dan pemeriksaan covid-19 lainnya	OK	600.000

Keterangan

Satuan biaya Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan pemeriksaan covid-19 lainnya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk satu kali test dari daerah kedudukan menuju daerah yang dituju dan sebaliknya. Satuan biaya untuk pemeriksaan Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan pemeriksaan covid-19 lainnya) diberikan dalam bentuk *at cost*, maksimal sesuai dengan tabel 4.1.2.7.

Contoh :

Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dari Kabupaten Solok ke Jakarta, maka alokasi biaya Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan pemeriksaan covid-19 lainnya) sebagai berikut:

1. Berangkat

Biaya Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan pemeriksaan covid-19 lainnya) dari daerah kedudukan (Provinsi Sumatera Barat) ke Jakarta.

2. Kembali

Biaya Swab Antigen (Rapid Test Antigen), Reserve Transcription *Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) dan pemeriksaan covid-19 lainnya) dari Jakarta ke daerah kedudukan (Provinsi Sumatera Barat).

4.2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk membiayai biaya perjalanan dinas di dalam kabupaten bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS.

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota terdiri dari :

- Uang Saku sebagaimana tabel 4.2.1
- Uang Transportasi dan Makan sebesar Rp.150.000,-/OH

4.2.1. SATUAN BIAYA UANG SAKU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	OH	150.000
2.	Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD, Eselon II	OH	140.000
3.	Eselon III, IV, Staf Golongan IV	OH	130.000
4.	Staf Golongan III/II/I	OH	120.000
5.	Non PNS	OH	100.000
6.	Diklat	OH	110.000

Keterangan :

- Apabila Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam, maka dibayarkan uang saku, uang transportasi dan makan.
- Apabila Perjalanan Dinas yang dilakukan tidak mencapai 8 jam, maka yang dibayarkan hanya uang transportasi dan makan.
- Biaya Perjalanan Dinas dalam Kota untuk Sopir tidak dibayarkan.

4.3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA (DALAM KABUPATEN)

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kabupaten yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber;
- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*); dan
- Uang harian peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber.

4.3.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT PULANG-PERGI (PP)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Kabupaten Solok	Orang/ Kali	150.000

4.3.2. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN (PAKET MEETING)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	1.1 <i>Halfday</i>	OP	245.000
	1.2 <i>Fullday</i>	OP	310.000
	1.3 <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	1.4 <i>Residence</i>	OP	555.000
2.	Setingkat Eselon II		
	2.1 <i>Halfday</i>	OP	173.000
	2.2 <i>Fullday</i>	OP	240.000
	2.3 <i>Fullboard</i>	OP	663.000
	2.4 <i>Residence</i>	OP	413.000

Keterangan :

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang menggunakan akomodasi paket *fullboard* dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4.3.3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	<i>Fullboard</i>	OH	120.000
2.	<i>Fullday/Halfday</i>	OH	85.000
3.	<i>Residence</i>	OH	120.000

4.4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kabupaten yang meliputi:

- Biaya transportasi peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber;
- Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
- Uang harian peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber; dan
- Uang Representasi.

4.4.1. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT LUAR KABUPATEN (ONE WAY)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kota Padang/Provinsi	Orang/Kali	210.000
2.	Kabupaten Agam	Orang/Kali	225.000
3.	Kabupaten Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
5.	Kabupaten Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
6.	Kabupaten Pasaman	Orang/Kali	250.000
7.	Kabupaten Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
9.	Kabupaten Sijunjung	Orang/Kali	225.000
10.	Kabupaten Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
11.	Kabupaten Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
12.	Kota Bukittinggi	Orang/Kali	215.000
13.	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
14.	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
15.	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
16.	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
17.	Kota Solok	Orang/Kali	210.000

Keterangan:

Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas paket *meeting* luar kabupaten dari Kabupaten Solok ke Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat, maka alokasi biaya transportasi darat luar kabupaten sebagai berikut:

1. Berangkat

Biaya transportasi darat luar Kabupaten dari Kabupaten Solok ke Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat.

2. Kembali

Biaya transportasi darat luar Kabupaten dari Kabupaten/Kota dalam Propinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Solok.

4.4.2. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR (PAKET MEETING)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	1.1 <i>Halfday</i>	OP	245.000
	1.2 <i>Fullday</i>	OP	310.000
	1.3 <i>Fullboard</i>	OP	987.000
	1.4 <i>Residence</i>	OP	555.000
2.	Setingkat Eselon II		
	2.1 <i>Halfday</i>	OP	173.000
	2.2 <i>Fullday</i>	OP	240.000
	2.3 <i>Fullboard</i>	OP	663.000
	2.4 <i>Residence</i>	OP	413.000

Keterangan :

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor yang menggunakan akomodasi paket *fullboard* dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

4.4.3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Fullboard	OH	120.000
2.	Fullday/Halfday	OH	85.000
3.	Residence	OH	120.000

4.4.4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati dan Wakil Bupati	OH	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	75.000

Keterangan :

Untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD dapat diberikan uang Representasi yang besarnya disamakan dengan Pejabat Eselon II.

4.5. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BIASA-LUAR NEGERI

Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara.

4.5.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN

1. Uang harian dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku, dan uang penginapan.
2. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara di mana perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.

Contoh:

Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian negara Kenya.

Catatan:

1. Golongan uang harian untuk Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan uang harian yang memungkinkan Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama.
2. Dalam hal golongan uang harian bagi Pelaksana SPD yang ditetapkan tidak memungkinkan mereka menginap dalam 1 (satu) tempat penginapan yang sama, diatur sebagai berikut:
 - a. masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau
 - b. dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
1	2	3	A	B	C	D
			4	5	6	7
1.	AMERIKA UTARA					
	1.1 Amerika Serikat	OH	659	563	505	447
	1.2 Kanada	OH	552	467	416	365
2.	AMERIKA SELATAN					
	2.1 Argentina	OH	534	402	351	349
	2.2 Venezuela	OH	557	388	344	343
	2.3 Brazil	OH	436	396	378	351

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	2.4 Chili	OH	434	370	332	294
	2.5 Kolombia	OH	466	413	405	365
	2.6 Peru	OH	459	352	320	280
	2.7 Suriname	OH	398	364	368	368
	2.8 Ekuador	OH	416	355	319	283
3.	AMERIKA TENGAH					
	3.1 Meksiko	OH	553	468	417	366
	3.2 Kuba	OH	453	385	345	305
	3.3 Panama	OH	418	357	320	283
4.	EROPA BARAT					
	4.1 Austria	OH	504	453	347	317
	4.2 Belgia	OH	538	456	406	357
	4.3 Perancis	OH	548	464	413	381
	4.4 Jerman	OH	485	415	368	324
	4.5 Belanda	OH	485	416	368	324
	4.6 Swiss	OH	636	570	444	401
5.	EROPA UTARA					
	5.1 Denmark	OH	569	491	428	375
	5.2 Finlandia	OH	521	442	394	346
	5.3 Norwegia	OH	621	559	389	386
	5.4 Swedia	OH	615	519	461	403
	5.5 Inggris	OH	792	774	583	582
6.	EROPA SELATAN					
	6.1 Bosnia dan Herzegovina	OH	456	420	334	333
	6.2 Kroasia	OH	555	506	406	405
	6.3 Spanyol	OH	457	413	335	296
	6.4 Yunani	OH	427	379	327	289
	6.5 Italia	OH	702	637	446	427
	6.6 Portugal	OH	425	382	308	273
	6.7 Serbia	OH	417	375	326	288
7.	EROPA TIMUR					
	7.1 Bulgaria	OH	406	367	320	284
	7.2 Ceko	OH	618	526	447	367
	7.3 Hongaria	OH	485	438	390	345
	7.4 Polandia	OH	478	415	363	320
	7.5 Rumania	OH	416	381	313	277
	7.6 Rusia	OH	556	512	407	406
	7.7 Slovakia	OH	437	394	341	303
	7.8 Ukraina	OH	485	436	375	331
8.	AFRIKA BARAT					
	8.1 Nigeria	OH	468	428	405	370
	8.2 Senegal	OH	461	393	336	311
9.	AFRIKA TIMUR					
	9.1 Etiopia	OH	420	374	330	285
	9.2 Kenya	OH	457	418	344	308
	9.3 Madagaskar	OH	396	366	286	252
	9.4 Tanzania	OH	458	386	357	303
	9.5 Zimbabwe	OH	430	400	330	316
	9.6 Mozambik	OH	472	436	356	319

4	1
---	---

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
10.	AFRIKA SELATAN					
	10.1 Namibia	OH	442	376	312	269
	10.2 Afrika Selatan	OH	440	400	363	317
11.	AFRIKA UTARA					
	11.1 Aljazair	OH	394	361	319	290
	11.2 Mesir	OH	481	426	405	361
	11.3 Maroko	OH	403	353	310	272
	11.4 Tunisia	OH	379	300	266	237
	11.5 Sudan	OH	443	408	358	280
	11.6 Libya	OH	456	393	340	320
12	ASIA BARAT					
	12.1 Azerbaijan	OH	498	459	365	364
	12.2 Bahrain	OH	475	424	284	217
	12.3 Irak	OH	461	392	351	310
	12.4 Yordania	OH	504	428	382	336
	12.5 Kuwait	OH	581	491	437	383
	12.6 Libanon	OH	457	389	348	307
	12.7 Qatar	OH	506	448	349	290
	12.8 Suriah	OH	358	301	272	243
	12.9 Turki	OH	456	364	311	276
	12.10 Uni Emirat Arab	OH	594	502	446	391
	12.11 Yaman	OH	353	249	226	204
	12.12 Saudi Arabia	OH	468	398	356	314
	12.13 Kesultanan Oman	OH	516	437	390	343
13.	ASIA TIMUR					
	13.1 Republik Rakyat Tiongkok	OH	411	351	315	279
	13.2 Hongkong	OH	601	507	451	395
	13.3 Jepang	OH	519	428	382	336
	13.4 Korea Selatan	OH	515	467	425	421
	13.5 Korea Utara	OH	494	321	300	278
14.	ASIA SELATAN					
	14.1 Afganistan	OH	385	262	238	214
	14.2 Bangladesh	OH	339	313	243	238
	14.3 India	OH	422	329	327	325
	14.4 Pakistan	OH	343	277	251	225
	14.5 Srilanka	OH	388	332	299	266
	14.6 Iran	OH	421	332	299	266
15.	ASIA TENGAH					
	15.1 Uzbekistan	OH	492	352	287	254
	15.2 Kazakhstan	OH	456	420	334	333
16.	ASIA TENGGARA					
	16.1 Filipina	OH	412	367	266	226
	16.2 Singapura	OH	615	519	461	403
	16.3 Malaysia	OH	394	304	274	244
	16.4 Thailand	OH	392	330	297	264
	16.5 Myanmar	OH	368	250	210	196
	16.6 Laos	OH	380	277	251	225
	16.7 Vietnam	OH	383	292	244	219
	16.8 Brunei Darusalam	OH	274	278	252	226
	16.9 Kamboja	OH	296	223	201	196

4 4

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (US \$)			
			GOLONGAN			
			A	B	C	D
1	2	3	4	5	6	7
	16.10 Timor Leste	OH	392	354	236	212
17.	ASIA PASIFIK					
	17.1 Australia	OH	636	585	424	393
	17.2 SelandiaBaru	OH	545	461	411	361
	17.3 KaledoniaBaru	OH	425	387	299	266
	17.4 Papua Nugini	OH	520	476	429	376
	17.5 Fuji	OH	427	365	327	289

Keterangan:

1. Golongan A untuk Bupati/Wakil Bupati;
2. Golongan B untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri dan pejabat lainnya yang setara;
3. Golongan C untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/Polri; dan
4. Golongan D untuk Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/Polri selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C.

4.5.2. SATUAN BIAYA TIKET PULANG PERGI (PP)

1. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri diperuntukkan bagi pembelian tiket pesawat udara dari Bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang-pergi (PP).
2. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airporttax* serta biaya retribusi lainnya.
3. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	AMERIKA UTARA			
	1.1 Chicago	12.733	6.891	3.662
	1.2 Houston	12.635	6.487	3.591
	1.3 Los Angeles	11.411	5.925	3.242
	1.4 New York	15.101	6.179	3.839
	1.5 Ottawa	12.266	6.924	4.083
	1.6 San Fransisco	13.438	7.138	2.987
	1.7 Toronto	11.750	8.564	3.201
	1.8 Vancouver	10.902	7.458	3.277
	1.9 Washington	15.150	8.652	3.930
2.	AMERIKA SELATAN			
	2.1 Bogota	18.399	9.426	7.713
	2.2 Brazilia	16.393	11.518	5.970
	2.3 Boenos Aires	23.000	15.300	10.400
	2.4 Caracas	23.128	13.837	6.825
	2.5 Paramaribo	15.018	9.494	7.353
	2.6 Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900
	2.7 Quito	17.325	16.269	12.127
	2.8 Lima	8.263	8.263	5.038
3.	AMERIKA TENGAH			
	3.1 Meksiko	11.822	7.831	3.966
	3.2 Havana	14.702	11.223	7.335
	3.3 Panama	15.532	9.306	6.195

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
4.	EROPA BARAT			
	4.1 Vienna	10.520	4.177	3.357
	4.2 Brussel	10.713	5.994	3.870
	4.3 Marseille	10.850	5.074	3.541
	4.4 Paris	10.724	6.085	3.331
	4.5 Berlin	10.277	6.126	3.959
	4.6 Bern	11.478	6.778	4.355
	4.7 Bonn	10.945	5.023	3.753
	4.8 Hamburg	9.938	7.639	4.108
	4.9 Geneva	8.166	5.370	4.333
	4.10 Amsterdam	8.216	5.898	3.331
	4.11 Den Haag	8.216	5.898	3.331
	4.12 Frankfurt	7.660	4.037	1.065
5.	EROPA UTARA			
	5.1 Kopenhagen	9.696	4.920	3.730
	5.2 Helsinki	10.023	5.931	3.681
	5.3 Stockholm	9.917	5.506	4.433
	5.4 London	11.410	7.293	4.153
	5.5 Oslo	9.856	4.773	4.049
6.	EROPA SELATAN			
	6.1 Sarajevo	11.778	7.129	6.033
	6.2 Zagreb	16.974	10.177	5.182
	6.3 Athens	14.911	9.256	8.041
	6.4 Lisbon	9.309	4.746	3.383
	6.5 Madrid	10.393	4.767	3.631
	6.6 Roma	10.000	6.000	4.500
	6.7 Beograd	10.318	6.404	5.564
	6.8 Vatikan	10.000	6.000	4.500
7.	EROPA TIMUR			
	7.1 Bratislava	7.125	4.423	3.842
	7.2 Bucharest	8.839	4.982	4.113
	7.3 Kiev	10.860	6.029	5.193
	7.4 Moskow	9.537	7.206	5.143
	7.5 Praha	19.318	11.848	6.748
	7.6 Sofia	7.473	6.346	3.612
	7.7 Warsawa	10.777	5.052	3.447
	7.8 Budapest	8.839	5.979	2.187
8.	AFRIKA BARAT			
	8.1 Dakkar	12.900	9.848	8.555
	8.2 Abuja	10.281	7.848	6.818
9.	AFRIKA TIMUR			
	9.1 Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
	9.2 Nairobi	8.732	7.966	6.081
	9.3 Antananarivo	11.779	9.000	8.282
	9.4 Dar Es Salaam	8.947	6.599	5.733
	9.5 Harare	11.118	10.600	5.747
10.	AFRIKA SELATAN			
	10.1 Windhoek	18.241	11.774	7.510
	10.2 Cape Town	17.182	9.703	8.429
	10.3 Johannesburg	12.943	9.802	7.216
	10.4 Maputo	11.255	8.524	6.275
	10.5 Pretoria	12.943	9.802	7.216

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
11.	AFRIKA UTARA			
	11.1 Algiers	9.536	6.593	5.710
	11.2 Kairo	8.683	7.122	4.483
	11.3 Khartoum	5.904	4.507	3.915
	11.4 Rabbat	8.910	7.721	5.665
	11.5 Tripoli	6.551	5.706	4.975
	11.6 Tunisia	9.419	5.018	3.619
12.	AFRIKA BARAT			
	12.1 Manama	6.573	6.154	4.827
	12.2 Baghdad	5.433	4.148	3.545
	12.3 Amman	7.561	6.431	3.545
	12.4 Kuwait	6.771	4.273	3.110
	12.5 Beirut	7.703	4.490	3.730
	12.6 Doha	5.216	3.639	2.745
	12.7 Damaskus	8.684	5.390	3.325
	12.8 Ankara	9.449	6.643	3.581
	12.9 Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
	12.10 Sanaa	8.205	5.878	3.679
	12.11 Jeddah	6.446	3.785	3.321
	12.12 Muscat	6.469	5.156	3.727
	12.13 Riyadh	5.359	3.510	3.000
	12.14 Istanbul	11.061	4.435	2.467
	12.15 Dubai	4.207	4.207	1.920
13.	ASIA TENGAH			
	13.1 Tashkent	13.617	8.453	7.343
	13.2 Astana	13.661	12.089	8.962
	13.3 Baku	13.234	8.556	2.281
14.	ASIA TIMUR			
	14.1 Beijing	2.595	2.140	1.623
	14.2 Hongkong	3.028	2.633	1.257
	14.3 Osaka	3.204	2.686	1.864
	14.4 Tokyo	3.734	2.675	1.835
	14.5 Pyongyang	4.040	2.220	1.660
	14.6 Seoul	3.233	2.966	1.737
	14.7 Shanghai	3.122	2.749	1.304
	14.8 Guangzhou	3.122	2.749	1.304
15.	ASIA SELATAN			
	15.1 Kabul	6.307	3.905	3.208
	15.2 Teheran	5.800	4.600	3.200
	15.3 Kolombo	3.119	2.562	1.628
	15.4 Dhaka	3.063	2.417	1.092
	15.5 Islamabad	5.482	3.333	2.501
	15.6 Karachi	4.226	3.633	2.321
	15.7 New Delhi	3.500	2.500	1.500
	15.8 Mumbai	3.063	2.417	1.092
16.	ASIA TENGGARA			
	16.1 Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
	16.2 Bangkok	2.344	1.155	823
	16.3 Davao City	2.757	2.558	1.641
	16.4 Dilli	747	491	350
	16.5 Hanoi	1.833	1.833	1.656
	16.6 Ho Chi Minh	1.677	1.503	1.235
	16.7 Johor Bahru	1.195	911	525

4 A

NO	KOTA	STANDAR BIAYA (US \$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
	16.8 Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
	16.9 Kuala Lumpur	1.158	659	585
	16.10 Kuching	2.659	1.900	364
	16.11 Manila	2.453	1.614	1.150
	16.12 Penang	918	766	545
	16.13 Phnom Penh	2.202	1.981	1.627
	16.14 Singapura	991	673	403
	16.15 Vientiane	2.274	2.025	1.420
	16.16 Yangon	1.468	1.212	1.053
	16.17 Tawau	1.894	1.427	694
	16.18 Songkhla	2.344	1.155	823
17.	ASIA PASIFIK			
	17.1 Canberra	6.304	6.304	2.500
	17.2 Darwin	6.689	4.900	3.964
	17.3 Melbourne	4.886	3.814	2.858
	17.4 Noumea	6.940	5.917	1.916
	17.5 Perth	5.771	1.801	1.525
	17.6 Port Moresby	17.090	13.835	8.252
	17.7 Suva	12.668	4.461	2.669
	17.8 Sydney	4.629	4.237	2.557
	17.9 Vaimo	3.318	2.740	2.380
	17.10 Wellington	11.750	9.830	4.120

Keterangan:

1. Eksekutif untuk Bupati/Wakil Bupati;
2. Bisnis untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c keatas, Pejabat Eselon II, Perwira Tinggi TNI/Polri dan pejabat lainnya yang setara; dan
3. Ekonomi untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III/IV dan Staf, Perwira Menengah TNI/Polri, anggota TNI/Polri dan selain yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Aturan lebih lanjut pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor :164/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

4. SATUAN BIAYA KONSUMSI

4.1. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makanan		
1.1	Rapat Koordinasi Tingkat Bupati dan Wakil Bupati/Eselon I/ Setara	Orang/ Kali	50.000
1.2	Rapat Biasa		
	a. Nasi Bungkus	Bungkus	20.000
	b. Nasi Kotak	Kotak	25.000
	c. Sarapan	Porsi	15.000
2.	Kudapan/Snack		
2.1	Rapat Koordinasi Tingkat Bupati dan Wakil Bupati/Eselon I/ Setara	Orang/ Kali	25.000
2.2	Rapat Biasa		
	a. Kudapan/Snack	Kotak	15.000

4 A

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	b. Minuman	Gelas	15.000
	c. Air Mineral (Botol)	Dus	45.000
	c. Air Mineral (Gelas)	Dus	20.000

4.2. SATUAN BIAYA KONSUMSI TAMU

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	25.000
2.	Sarapan	Porsi	20.000
3.	Kudapan/ <i>Snack</i> /Minum	Kotak	15.000

4.3. SATUAN BIAYA KONSUMSI PELATIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	25.000
2.	Kudapan/ <i>Snack</i> /Minum	Kotak	15.000
3.	Makan Minum Pelatihan	OH	120.000

4.4. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN PELAKSANAAN DIKLAT/PELATIHAN DAN SEJENISNYA DENGAN POLA FASILITASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (2 Protein)	OH	120.000
2.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (3 Protein)	OH	140.000
3.	Paket Makanan dan Minuman Harian Peserta, Panitia, Petugas Kelas, Widyaswara, Narasumber (4 Protein)	OH	160.000
4.	Paket Makanan dan Minuman Panitia, Penguji, Widyaswara dan Mentor pada pelaksanaan seminar rancangan aktualisasi dan seminar evaluasi pelaksanaan aktualisasi (1 kali <i>snack</i> + 1 kali makan)	OH	50.000

4.5. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUM LAPANGAN/HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Makan	Kotak	20.000
2.	Kudapan/ <i>Snack</i> /Minum	Kotak	15.000

4.6. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN KDH, WKDH DAN KETUA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	Bulan	20.000.000
2.	Wakil Bupati	Bulan	15.000.000
3.	Ketua DPRD	Bulan	15.000.000

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	182.000
2.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	124.000
3.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

5.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

5.2.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kendaraan Dinas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	unit/tahun	41.900.000
2.	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	unit/tahun	39.190.000

5.2.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 6	unit/tahun	30.000.000
2.	Untuk Kendaraan Dinas <i>Double</i> Gardan	unit/tahun	25.000.000
3.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 4		
	3.1 Usia Kendaraan 0 s/d 5 Tahun	unit/tahun	15.000.000
	3.2 Usia Kendaraan diatas 5 tahun	unit/tahun	20.000.000
4.	Untuk Kendaraan Dinas Roda 2	unit/tahun	3.850.000

5.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/ Pertahun	80.000
2.	Personal Komputer/Note Book	unit/tahun	730.000
3.	Printer	unit/tahun	690.000
4.	AC Split	unit/tahun	610.000
5.	Genset lebih Kecil dari 50 KVA	unit/tahun	7.190.000
6.	Genset 75 KVA	unit/tahun	8.640.000
7.	Genset 100 KVA	unit/tahun	10.150.000
8.	Genset 125 KVA	unit/tahun	10.780.000
9.	Genset 150 KVA	unit/tahun	13.260.000
10.	Genset 175 KVA	unit/tahun	14.810.000
11.	Genset 200 KVA	unit/tahun	15.850.000
12.	Genset 250 KVA	unit/tahun	16.790.000
13.	Genset 275 KVA	unit/tahun	17.760.000
14.	Genset 300 KVA	unit/tahun	20.960.000
15.	Genset 350 KVA	unit/tahun	22.960.000
16.	Genset 450 KVA	unit/tahun	25.620.000
17.	Genset 500 KVA	unit/tahun	31.770.000

5.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN INSTALASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pemeliharaan Instalasi Air	Tahun	3.000.000
2.	Pemeliharaan Instalasi Listrik	Tahun	1.000.000

6. SATUAN BIAYA PAJAK KENDARAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pajak Kendaraan Roda 2/Roda 3		
	1.1 Kategori 1	unit/tahun	120.000
	1.2 Kategori 2	unit/tahun	200.000
	1.3 Kategori 3	unit/tahun	300.000
	1.4 Kategori 4	unit/tahun	500.000
2.	Pajak Kendaraan Roda 4		
	2.1 Kategori 1	unit/tahun	500.000
	2.2 Kategori 2	unit/tahun	800.000
	2.3 Kategori 3	unit/tahun	1.300.000
	2.4 Kategori 4	unit/tahun	2.000.000
	2.5 Kategori 5	unit/tahun	3.100.000
3.	Biaya Pajak Kendaraan Roda 6 (Dum Truk)	unit/tahun	2.000.000
4.	Pajak Kendaraan Roda 10 (Tronton)	unit/tahun	2.600.000

7. SATUAN BIAYA DIKLAT

7.1. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA POLA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (Es.II)	Orang	30.261.000
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Es.III)	Orang	22.125.000
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Es.IV)	Orang	20.230.000
4.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III Pelamar Umum	Orang	9.296.000
5.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III K1, K2	Orang	2.242.000
6.	Diklat sampai dengan 6 Hari	Orang	4.750.000
7.	Diklat sampai dengan 8 Hari	Orang	5.000.000
8.	Diklat sampai dengan 12 Hari	Orang	6.500.000
9.	Diklat sampai dengan 16 Hari	Orang	7.500.000
10.	Diklat sampai dengan 20 Hari	Orang	8.750.000
11.	Diklat sampai dengan 30 Hari	Orang	10.000.000
12.	Diklat sampai dengan 78 Hari	Orang	22.500.000
13.	Seleksi Calon Peserta PKN Tk. II (Es. II)	Orang	1.900.000
14.	Seleksi Calon Peserta PKA (Es.III)	Orang	700.000
15.	Seleksi Calon Peserta PKP (Es.IV)	Orang	500.000
16.	Seleksi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	600.000
17.	Uji Kompetensi untuk 30 orang asesi	Orang	3.600.000
18.	Uji Kompetensi untuk 60 orang asesi	Orang	2.600.000
19.	Uji Kompetensi untuk 90 orang asesi	Orang	2.275.000
20.	Bimbingan Teknis/Orientasi	Orang	4.000.000

7.2. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA POLA FASILITASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Es.IV)	Angkatan	18.000.000
2.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III Pelamar Umum	Angkatan	15.750.000
3.	Pelatihan Dasar Golongan I, II dan III K1, K2	Angkatan	13.500.000
4.	Diklat sampai dengan 6 Hari	Angkatan	10.500.000
5.	Diklat sampai dengan 8 Hari	Angkatan	11.750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Diklat sampai dengan 12 Hari	Angkatan	12.500.000
7.	Diklat sampai dengan 16 Hari	Angkatan	13.500.000
8.	Diklat sampai dengan 20 Hari	Angkatan	14.500.000
9.	Diklat sampai dengan 30 Hari	Angkatan	16.000.000
10.	Diklat sampai dengan 78 Hari	Angkatan	27.075.000
11.	Modul Diklat	Set	250.000
12.	Bimbingan Teknis/Orientasi	Kegiatan	9.000.000

7.3. SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN POLA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Diklat PIM Tk.II	Orang	35.000.000
2.	Diklat PIM Tk.III	Orang	24.000.000
3.	Diklat PIM Tk.IV	Orang	22.000.000

7.4. SATUAN BIAYA PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR POLA FASILITASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pelatihan Dasar Gol.I, II dan III Pelamar Umum	Angkatan	15.750.000
2.	Pelatihan Dasar Gol.I, II dan III K1, K2	Angkatan	13.500.000

7.5. SATUAN BIAYA KONTRIBUSI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Kontribusi Bimbingan Teknis DPRD	Orang	5.000.000
2.	Kontribusi Bimbingan Teknis ASN (Rapat Koordinasi/Asosiasi Sekwan se Indonesia	Orang	5.000.000
3.	Kontribusi Pendamping Haji	OK	70.000.000
4.	Kontribusi Peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah	Orang	100.000

8. SATUAN BIAYA SEWA

8.1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

8.1.1. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL/DARURAT

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2.	Sumatera Utara	Per hari	987.000	2.592.000	3.203.000
3.	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4.	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5.	Jambi	Per hari	1.005.000	4.468.000	5.752.000
6.	Sumatera Barat	Per hari	890.000	2.124.000	3.500.000
7.	Sumatera Selatan	Per hari	1.507.000	2.200.000	4.097.000
8.	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9.	Bengkulu	Per hari	788.000	3.810.000	5.159.000
10.	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11.	Banten	Per hari	972.000	2.512.000	4.120.000
12.	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.519.000
13.	D.K.I Jakarta	Per hari	1.139.000	2.221.000	3.439.000

41

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
1	2	3	4	5	6
14.	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.662.000	4.237.000
15.	D.I. Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16.	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17.	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Per hari	1.103.000	2.532.000	3.369.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20.	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21.	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.694.000
22.	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.550.000
23.	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	4.829.000
24.	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	4.829.000
25.	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26.	Gorontalo	Per hari	792.000	2.504.000	3.230.000
27.	Sulawesi Barat	Per hari	850.000	2.464.000	3.282.000
28.	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000
29.	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.423.000	4.212.000
30.	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	5.150.000
31.	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32.	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33.	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34.	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

Keterangan

1. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda (6) enam/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus), dengan angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 8.1.1.

Satuan biaya ini diperuntukan bagi:

- a. Pejabat Negara (Bupati/Wakil Bupati dan Ketua DPRD) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
- b. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Satuan sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

2. Satuan biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas (di luar Provinsi):
 - a. Apabila perjalanan dinas dilakukan secara rombongan yang pesertanya lebih dari 4 orang, maka sarana transportasi dapat dilaksanakan dengan menyewa kendaraan (*rental/charter*) yang dibebankan kepada salah satu peserta yang memanfaatkan kendaraan tersebut dengan ketentuan tidak melebihi angka tertinggi sebagaimana tercantum dalam tabel 8.1.1.
 - b. Pembebanan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah memperhitungkan harga sewa kendaraan, biaya sopir dan BBM.
 - c. Sewa Kendaraan dapat dilakukan dengan cara :
 - 1) Menyewa dari tempat kedudukan ke tempat pelaksanaan perjalanan dinas (ke tempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan tempat kedudukan.
Contoh : Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan yang berlaku pada tabel Sumatera Barat.
 - 2) Menyewa kendaraan di tempat pelaksanaan perjalanan dinas (di tempat tujuan), maka indeks sewa kendaraan mengacu pada indeks sewa kendaraan di tempat tujuan.

Biasanya sewa kendaraan ini digunakan apabila melakukan perjalanan dinas luar daerah secara rombongan yang menggunakan akomodasi pesawat/kapal laut (transit) dan membutuhkan transportasi tambahan.
Contoh : Perjalanan Dinas dari Kabupaten Solok ke Aceh, maka biaya sewa kendaraannya menggunakan indeks sewa kendaraan berlaku di tabel Aceh.

8.1.2. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
	PejabatEselon II		
1.	Aceh	Perbulan	14.180.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	13.880.000
3.	Riau	Perbulan	13.730.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	15.000.000
5.	Jambi	Perbulan	13.500.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	13.650.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	13.500.000
8.	Lampung	Perbulan	13.430.000
9.	Bengkulu	Perbulan	13.500.000
10.	Bangka Belitung	Perbulan	12.750.000
11.	Banten	Perbulan	13.950.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	13.950.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	13.250.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	13.950.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	14.030.000
16.	Jawa Timur	Perbulan	13.430.000
17.	Bali	Perbulan	13.500.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	13.650.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	14.850.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	14.030.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	14.140.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	14.030.000
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	14.030.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	14.030.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	15.000.000
26.	Gorontalo	Perbulan	15.000.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	13.580.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	13.580.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	14.400.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	14.030.000
31.	Maluku	Perbulan	14.480.000
32.	Maluku Utara	Perbulan	14.400.000
33.	Papua	Perbulan	14.850.000
34.	Papua Barat	Perbulan	14.780.000

8.1.3. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
1.	Aceh	Perbulan	6.300.000	6.530.000	15.230.000
2.	Sumatera Utara	Perbulan	6.080.000	6.080.000	15.080.000
3.	Riau	Perbulan	5.930.000	6.000.000	15.000.000
4.	Kepulauan Riau	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
5.	Jambi	Perbulan	5.850.000	5.930.000	14.780.000
6.	Sumatera Barat	Perbulan	5.930.000	6.150.000	14.850.000
7.	Sumatera Selatan	Perbulan	5.550.000	5.850.000	14.780.000
8.	Lampung	Perbulan	5.780.000	5.850.000	14.780.000
9.	Bengkulu	Perbulan	5.930.000	5.930.000	14.780.000

NO	URAIAN	SATUAN	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	2	3	4	5	6
10.	Bangka Belitung	Perbulan	6.230.000	6.380.000	15.150.000
11.	Banten	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
12.	Jawa Barat	Perbulan	5.400.000	5.670.000	14.480.000
13.	D.K.I Jakarta	Perbulan	5.660.000	6.690.000	14.770.000
14.	Jawa Tengah	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
15.	D.I. Yogyakarta	Perbulan	5.630.000	5.850.000	14.520.000
16.	Jawa Timur	Per Bulan	5.630.000	5.850.000	14.630.000
17.	Bali	Perbulan	5.930.000	6.000.000	14.930.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Perbulan	6.080.000	6.230.000	15.000.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Perbulan	7.130.000	7.350.000	16.130.000
20.	Kalimantan Barat	Perbulan	6.380.000	6.530.000	15.230.000
21.	Kalimantan Tengah	Perbulan	6.750.000	6.680.000	15.530.000
22.	Kalimantan Selatan	Perbulan	6.720.000	6.530.000	15.380.000
23.	Kalimantan Timur	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
24.	Kalimantan Utara	Perbulan	6.380.000	7.200.000	15.230.000
25.	Sulawesi Utara	Perbulan	7.350.000	7.500.000	16.280.000
26.	Gorontalo	Perbulan	7.280.000	7.430.000	16.280.000
27.	Sulawesi Barat	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
28.	Sulawesi Selatan	Perbulan	6.150.000	5.890.000	15.080.000
29.	Sulawesi Tengah	Perbulan	6.750.000	6.980.000	15.680.000
30.	Sulawesi Tenggara	Perbulan	6.900.000	6.380.000	15.900.000
31.	Maluku	Perbulan	8.180.000	6.830.000	17.250.000
32.	Maluku Utara	Perbulan	7.880.000	6.830.000	16.880.000
33.	Papua	Perbulan	8.630.000	7.200.000	17.630.000
34.	Papua Barat	Perbulan	8.480.000	7.130.000	17.330.000

Keterangan:

Satuan Biaya Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/Operasional Kantor dan/atau Lapangan

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian.

Penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Catatan:

- Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor.
- Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.
- Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan yang kurang dari satu bulan mengikuti harga pasar yang berlaku.

8.1.4. SATUAN BIAYA SEWA MOBIL AMBULANCE

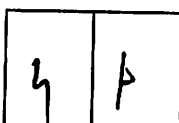
NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Dalam Radius 10 Km	Km	75.000
2.	Dalam Radius < 10 Km	Km	7.500
3.	Biaya Sewa Mobil Ambulance	Kegiatan	5.000.000

8.2. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Sewa Rumah Singgah	Unit/Tahun	10.000.000
2.	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat untuk Sewa Rumah Tempat Kerja (Tenaga kerja magang yang dikirim oleh pemerintah daerah)	Bulan	700.000
3.	Belanja Sewa Tanah untuk Sewa Lahan Pertanian untuk demplot	Paket	1.000.000
4.	Belanja Sewa untuk kegiatan Pelatihan/Diklat		
	4.1 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	150.000
	4.2 Sewa Ruang Belajar	OH	150.000
	4.3 Sewa Ruang Makan	OH	150.000
	4.4 Sewa Ruang Pertemuan	OH	350.000
	4.5 Sewa Kamar Tidur	OH	75.000
	4.6 Sewa Penginapan Peserta dan Panitia	OH	75.000
5.	Belanja Sewa Penginapan Peserta Pelatihan/Bimtek/Workshop	OH	350.000
6.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan (Biaya Sewa untuk Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak)	OH	650.000
7.	Sewa Gedung, Aula, Hall, Lapangan	Hari	1.300.000

8.3. SATUAN BIAYA SEWA PERLENGKAPAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Tenda Roder		
	1.1 Ukuran 20 x 10	Buah/Hari	14.000.000
	1.2 Ukuran 12 x 12	Buah/Hari	10.080.000
	1.3 Ukuran 10 x 10	Buah/Hari	7.000.000
	1.4 Ukuran 12 x 8	Buah/Hari	6.720.000
	1.5 Tenda Roder	Meter	90.000
2.	Tenda VIP		
	2.1 Ukuran 6 x 8	Buah/Hari	1.760.000
	2.2 Ukuran 6 x 6	Buah/Hari	1.200.000
	2.3 Ukuran 4 x 6	Buah/Hari	700.000
	2.4 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	600.000
	2.5 Ukuran 3 x 4	Buah/Hari	500.000
3.	Tenda Pentas		
	3.1 Ukuran 4 x 9	Buah/Hari	3.600.000
	3.2 Ukuran 4 x 6	Buah/Hari	2.400.000
	3.3 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	1.600.000
	3.4 Ukuran 3 x 4	Buah/Hari	1.200.000
	3.5 Tenda Pentas	Meter	110.000



NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
4.	Tenda Kerucut		
	4.1 Ukuran 4 x 4	Buah/Hari	880.000
	4.2 Ukuran 5 x 5	Buah/Hari	1.100.000
5.	Tenda Sarnavil	Buah/Hari	770.000
6.	Tenda Sofa	Buah/Hari	440.000
7.	Meja Kursi		
	7.1 Meja Prasmanan + Rimpel ukuran 1 X 3,6	Buah/Hari	200.000
	7.2 Meja Bulat + Rimpel ukuran Diameter 1,25 m	Buah/Hari	75.000
	7.3 Meja Petak + Rimpel ukuran 120 X 0,8 m	Buah/Hari	75.000
	7.4 Kursi Sofa	Set/Hari	400.000
	7.5 Kursi Plastik + sarung	Buah/Hari	15.000
	7.6 Kursi Plastik	Buah/Hari	10.000
8.	Kipas Angin Embun	Unit/Hari	500.000
9.	Karpet		
	9.1 Karpet Merah	Meter/Hari	20.000
	9.2 Karpet Permadani	Lembar/Hari	200.000
10.	Pelaminan		
	10.1 Pelaminan VIP	Paket/Hari	7.500.000
	10.2 Pelaminan Standart	Paket/Hari	5.000.000
11.	Taman Bunga	Paket/Hari	2.000.000

8.4. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN STUDIO

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Orgen dan Sound System	Paket/Hari	5.000.000

8.5. SATUAN BIAYA SEWA KOMPUTER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Komputer CAT Seleksi CPNS	Unit/Sesi	75.000

8.6. SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN OLAAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Paralayang	Kali	100.000
2.	Sewa Sepeda	Kali	20.000
3.	Sewa Baju	Kali	30.000

8.7. SATUAN BIAYA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Penampilan Kesenian (Pakaian Tari, Pakaian Adat)	Hari	150.000

4 b

8.8. SATUAN BIAYA SEWA Co - LOCATION SERVER

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Sewa Co - Location Server Kapasitas 2 U dan Internet IIX Up to 50 Mbps	Bulan	4.166.000

8.9. SATUAN BIAYA SEWA ALAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Sewa Alat Praktek Tabung Racun Api	Buah	100.000
2.	Sewa Alat Perahu Karet	Buah	200.000

9. SATUAN BIAYA HADIAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Perorangan Tingkat Kecamatan		
	1.1 Juara 1	Per Orang	2.000.000
	1.2 Juara 2	Per Orang	1.500.000
	1.3 Juara 3	Per Orang	1.000.000
	1.4 Harapan 1	Per Orang	750.000
	1.5 Harapan 2	Per Orang	500.000
2.	Perorangan Tingkat Kabupaten		
	2.1 Juara 1	Per Orang	3.000.000
	2.2 Juara 2	Per Orang	2.000.000
	2.3 Juara 3	Per Orang	1.500.000
	2.4 Harapan 1	Per Orang	1.000.000
	2.5 Harapan 2	Per Orang	750.000
3.	Kelembagaan/Kelompok Tingkat Kecamatan		
	3.1 Juara 1	Per Kelompok	3.000.000
	3.2 Juara 2	Per Kelompok	2.500.000
	3.3 Juara 3	Per Kelompok	2.000.000
	3.4 Harapan 1	Per Kelompok	1.500.000
	3.5 Harapan 2	Per Kelompok	1.000.000
4.	Kelembagaan/Kelompok Tingkat Kabupaten		
	4.1 Juara 1	Per Kelompok	5.000.000
	4.2 Juara 2	Per Kelompok	4.000.000
	4.3 Juara 3	Per Kelompok	3.000.000
	4.4 Harapan 1	Per Kelompok	2.500.000
	4.5 Harapan 2	Per Kelompok	2.000.000
5.	Biaya Reward Pemenang		
	5.1 Juara Favorit	Grup	300.000
	5.2 Juara Terheboh	Grup	300.000

10. SATUAN BIAYA BELANJA AIR

No.	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi Air (M³) (Rp)			
		0 – 10	11 – 20	21 – 30	>30
1	2	3	4	5	6
1.	Kelompok I				
	1.1 Sosial Umum	960	1.200	1.440	1.680
	1.2 Sosial Khusus	960	1.200	1.440	1.800
2.	Kelompok II				
	2.1 Rumah Tangga A	1.200	1.530	1.860	2.520
	2.2 Rumah Tangga B	1.530	1.860	2.520	3.000
	2.3 Rumah Tangga C	1.860	2.520	3.420	3.600
3.	Kelompok III				
	3.1 Instansi Pemerintah	1.680	3.060	3.600	4.200
4.	Kelompok IV				
	4.1 Niaga Kecil	2.520	3.120	3.720	4.800
	4.2 Niaga Besar	3.120	3.720	4.800	6.000
	4.3 Industri Kecil	2.760	3.240	4.200	5.400
5.	Mobil Tangki	Berdasarkan kesepakatan minimal sama dengan tarif biaya penuh			

11. SATUAN BIAYA BELANJA LISTRIK

No.	Golongan Tarif Listrik	Batas Daya	SATUAN	BIAYA (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	R-1/TR	0 – 450 VA	kWh	169	Rumah Tangga Kecil
2.	R-1/TR	451 – 900 VA	kWh	274	Rumah Tangga Kecil
3.	R-1M/TR	451 – 900 VA	kWh	1.352	Rumah Tangga Kecil
4.	R-1/TR	901 – 1.300 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Kecil
5.	R-1/TR	1.301 – 2.200 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Kecil
6.	R-2/TR	2.201 – 5.500 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Menengah
7.	R-3/TR	>5.501 VA	kWh	1.467,28	Rumah Tangga Besar
8.	B-1/TR	0 – 450 VA	kWh	254	Bisnis Kecil
9.	B-1/TR	451 – 900 VA	kWh	420	Bisnis Kecil
10.	B-1/TR	901 – 1.300 VA	kWh	966	Bisnis Kecil
11.	B-1/TR	1.301 – 5.500 VA	kWh	1.100	Bisnis Kecil
12.	B-2/TR	5.501 VA – 200 kVA	kWh	1.467,28	Bisnis Sedang
13.	B-3/TM	>200 KVA	kWh	1.035,78	Bisnis Besar
14.	I-1/TR	0 – 450 VA	kWh	160	Industri Skala Kecil
15.	I-1/TR	450 – 900 VA	kWh	315	Industri Skala Kecil
16.	I-1/TR	901 – 1.300 VA	kWh	930	Industri Skala Kecil
17.	I-1/TR	1.301 – 2.200 VA	kWh	960	Industri Skala Kecil
18.	I-1/TR	3.500 – 14.000 VA	kWh	1.112	Industri Skala Kecil
19.	I-2/TR	14.001 VA– 200 kVA	kWh	972	Industri Skala Menengah
20.	I-3P/TM	>200 kVA	kWh	1.035,78	Industri Skala Menengah
21.	I-3/TM	>200 kVA	kWh	1.035,78	Industri Skala Menengah
22.	I-4/TT	>2.000 kVA	kWh	996,74	Industri Besar
23.	P-1/TR	0 – 450 VA	kWh	575	Kantor Pemerintahan Kecil
24.	P-1/TR	451 – 900 VA	kWh	600/kWh	Kantor Pemerintahan Kecil
25.	P-1/TR	1.300 VA	kWh	1.049	Kantor Pemerintahan Kecil
26.	P-1/TR	2.200 – 5.500 VA	kWh	1.076	Kantor Pemerintahan Kecil
27.	P-1/TR	5.501 VA – 200 Kva	kWh	1.467,28	Kantor Pemerintahan Kecil
28.	P-2/TR	>200 Kva	kWh	1.035,78	Kantor Pemerintahan Besar

3/4

12. SATUAN BIAYA BELANJA TELEPON

Belanja Telepon

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Telepon	Bulan	200.000

Belanja Paket Telepon untuk KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Bupati	Bulan	4.500.000
2.	Wakil Bupati	Bulan	4.000.000
3.	Sekretaris Daerah	Bulan	3.000.000
4.	Asisten Sekretariat Daerah	Bulan	2.500.000

13. SATUAN BIAYA BELANJA SURAT KABAR/MAJALAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Surat Kabar/Majalah Aktual	Eksemplar	7.500
2.	Surat Kabar/Majalah Sumbar Creative	Eksemplar	7.000
3.	Surat Kabar/Majalah Lintas Media	Eksemplar	9.000
4.	Surat Kabar/Majalah Media Citra	Eksemplar	8.000
5.	Surat Kabar/Majalah Akurat	Eksemplar	7.000
6.	Surat Kabar/Majalah Bidik Indonesia	Eksemplar	7.000
7.	Surat Kabar/Majalah BiNews	Eksemplar	6.000
8.	Surat Kabar/Majalah Inter News	Eksemplar	5.600
9.	Surat Kabar/Majalah Bidik Kasus	Eksemplar	8.500
10.	Surat Kabar/Majalah Wawasan	Eksemplar	7.500
11.	Surat Kabar/Majalah Editor	Eksemplar	7.000
12.	Surat Kabar/Majalah Senior	Eksemplar	7.000
13.	Surat Kabar/Majalah Suara Kita	Eksemplar	7.500
14.	Surat Kabar/Majalah Padang Expo	Eksemplar	7.500
15.	Surat Kabar/Majalah Metro Talenta	Eksemplar	7.000
16.	Surat Kabar/Majalah Sumut24	Eksemplar	5.000
17.	Surat Kabar/Majalah The Public	Eksemplar	3.200
18.	Surat Kabar/Majalah Investigasi	Eksemplar	7.000
19.	Surat Kabar/Majalah Target	Eksemplar	6.500
20.	Surat Kabar/Majalah Sangkakala	Eksemplar	7.000
21.	Surat Kabar/Majalah Sumbar Post	Eksemplar	8.000
22.	Surat Kabar/Majalah Zaman	Eksemplar	7.000
23.	Surat Kabar/Majalah Indonesia Raya	Eksemplar	12.500
24.	Surat Kabar/Harian Khazanah	Eksemplar	4.000
25.	Surat Kabar/Harian Pos Metro Padang	Eksemplar	4.000
26.	Surat Kabar/Harian Rakyat Sumbar	Eksemplar	4.000
27.	Surat Kabar/Harian Koran Padang	Eksemplar	4.000
28.	Surat Kabar/Harian Haluan	Eksemplar	5.000
29.	Surat Kabar/Harian Padang Ekspres	Eksemplar	4.000
30.	Surat Kabar/Harian Singgalang	Eksemplar	4.000
31.	Surat Kabar/Majalah News Publik	Eksemplar	12.000
32.	Surat Kabar/Majalah Perangi Korupsi	Eksemplar	11.000
33.	Surat Kabar/Majalah Minang Pers	Eksemplar	10.000
34.	Surat Kabar/Majalah Rakyat Sumbar	Eksemplar	8.000
35.	Surat Kabar/Majalah Integritas	Eksemplar	8.000
36.	Surat Kabar/Majalah Pindo Merdeka	Eksemplar	7.000

14. SATUAN BIAYA BELANJA MEDIA ONLINE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Langganan Media Online	Berita/ Materi	75.000

15. SATUAN BIAYA BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET

15.1. SATUAN BIAYA BELANJA INTERNET

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Paket I 10 Mbps	Bulan	360.000
2.	Paket II 20 Mbps	Bulan	395.000
3.	Paket III 30 Mbps	Bulan	480.000
4.	Paket IV 40 Mbps	Bulan	560.000
5.	Paket V 50 Mbps	Bulan	625.000
6.	Administrasi Data Base (Disduk Capil-DAK)	OB	250.000
7.	Operator Komputer (Disduk Capil-DAK)	OB	150.000

Belanja Internet untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Belanja Internet Telkom	Bulan	5.000.000
2.	Belanja Internet LKPP	Bulan	4.200.000

15.2. SATUAN BIAYA BELANJA KAWAT FAXIMILE

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	ASTINET Bandwidth Internasional 2 Mbps/Domestik 10 Mbps	Bulan	4.545.500
2.	Fiber Optik Domestik 300 Mbps Internet Dedicated Mixed (IX+IIX)	Bulan	116.201.000
3.	Fiber Optik Domestik 400 Mbps Internet Dedicated Mixed (IX+IIX)	Bulan	163.040.000
4.	Fiber Optik Domestik 500 Mbps Internet Dedicated Mixed (IX+IIX)	Bulan	200.000.000
5.	Lisensi WHM	Tahun	10.000.000
6.	Lisensi Firewall	Tahun	35.000.000
7.	Lisensi SSL	Tahun	4.000.000
8.	Sewa Domain	Tahun	61.500

16. SATUAN BIAYA BELANJA PAKET/PENGIRIMAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Paket/Pengiriman	Kg	50.000,-

Keterangan :

Biaya Paket/Pengiriman dibayarkan secara *at cost*.

17. SATUAN BIAYA BELANJA LEMBUR

SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- 1. Uang lembur dapat diberikan kepada PNS/Non PNS yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas untuk mengerjakan pekerjaan yang sifatnya sangat mendesak, bagi pegawai Non PNS, uang lemburnya disamakan dengan PNS Golongan II.
- 2. Jam lembur dihitung berdasarkan *print out* absen elektronik.
- 3. Pada hari libur, uang lembur dibayarkan 200% dari uang lembur pada hari kerja.
- 4. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut untuk semua golongan/pangkat.
- 5. Uang makan Lembur dapat diberikan lebih dari satu kali dengan ketentuan uang makan lembur kedua dapat diberikan pada jam ke 7 (tujuh) pelaksanaan lembur secara berturut turut untuk semua golongan/pangkat.
- 6. Bagi kegiatan yang dilaksanakan pada suatu tempat yang ditanggung biaya makan dan penginapannya maka biaya lembur tidak dibayarkan lagi.
- 7. Kepada Pegawai Puskesmas yang melaksanakan Lembur pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) per hari.
- 8. Kepada Petugas Pelayanan Perpustakaan yang melaksanakan Lembur pada hari Sabtu, minggu dan hari libur lainnya dapat diberikan uang lembur sebesar Rp.75.000,- (Tujuh Puluh ribu rupiah) per hari.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Uang Lembur		
	a. Golongan IV	OJ	25.000
	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan II	OJ	17.000
	d. Golongan I	OJ	13.000
2.	Uang Makan Lembur	OK	35.000

18. SATUAN BIAYA BELANJA PAKAIAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Pakaian Sipil Harian (PSH)		
	a. Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD	Stel	1.770.000
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	5.500.000
2.	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD	Stel	3.600.000
	b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	5.775.000
3.	Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) DPRD	Stel	2.175.000
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	3.745.000
	c. Bahan Pakaian Dinas Harian (PDH)	Stel	750.000
4.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)		
	a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPRD	Stel	2.000.000
	b. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	5.775.000
5.	Pakaian Kerja Lapangan		
	a. Pakaian Kerja Lapangan	Stel	1.575.000
	b. Pakaian Dinas Lapangan Dinas Perhubungan	Stel	552.000
	c. Pakaian Kerja <i>Cleaning Service</i>	Stel	275.000
	d. Baju Lapangan Petugas Kebersihan	Stel	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
6.	Pakaian Kerja Lainnya		
	a. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan	Stel	492.000
	b. Pakaian Praktek BLK	Stel	150.000
	c. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Stel	552.000
7.	Pakaian Adat Daerah		
	a. Pakaian Ninik Mamak	Stel	300.000
	b. Pakaian Adat Daerah	Stel	2.150.000
	c. Pakaian Melayu Pimpinan	Stel	2.050.000
	d. Kain Sarung Silungkang Sintesis	Pcs	150.000
	e. Songket	Pcs	50.000
	f. Baju Bundo Kanduang	Stel	300.000
	g. Baju Seragam Kegiatan		
	- Baju Seragam Perempuan	Stel	995.000
	- Baju Seragam Laki-laki	Stel	1.045.000
8.	Pakaian Batik Tradisional		
	a. Pakaian Corak Daerah (DPRD)	Stel	1.200.000
	b. Pakaian Batik Nasional	Stel	4.200.000
	c. Pakaian Seragam Batik Daerah untuk Pemda	Buah	300.000
	d. Baju Batik Berlengan Panjang	Buah	4.200.000
9.	Pakaian Olahraga		
	a. Baju Kaos Olahraga	Buah	192.000
	b. Celana Trainning Olah Raga	Buah	240.000
10.	Pakaian khusus dan hari-hari tertentu Lainnya		
	a. Pakaian Jadi Seragam Pemda	Stel	732.000
	b. Pakaian Pramuka	Stel	3.675.000
	c. Pakaian Jadi Seragam Linmas Lengkap (Pejabat)	Stel	1.032.000
	d. Pakaian Jadi Seragam Linmas Lengkap (Staf)	Stel	972.000
	e. Pakaian Jas (Bahan Wol)	Stel	3.360.000
	f. Pakaian Jas (Bahan Wol Biasa)	Stel	2.760.000

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA



